



**PERAN SOUTHERN AFRICAN DEVELOPMENT COMMUNITY (SADC)  
DALAM MENGATASI KRISIS DI ZIMBABWE  
(THE ROLE OF THE SOUTHERN AFRICAN DEVELOPMENT COMMUNITY (SADC)  
IN OVERCOMING ZIMBABWE'S CRISIS)**

**SKRIPSI**

Oleh

**Monjy Minomahasetra  
NIM 100910101077**

**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2014**



**PERAN SOUTHERN AFRICAN DEVELOPMENT COMMUNITY (SADC)  
DALAM MENGATASI KRISIS DI ZIMBABWE  
(THE ROLE OF THE SOUTHERN AFRICAN DEVELOPMENT COMMUNITY (SADC)  
IN OVERCOMING ZIMBABWE'S CRISIS)**

**SKRIPSI**

Dilakukan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

**Monjy Minomahasetra  
NIM 100910101077**

**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2014**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Rasoarimino Delphine yang tercinta;
2. Kakak Razafiarimbola Tsiriniaina Vonintsoa;
3. Almamater Universitas Jember.



MOTO

Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, dan manusia yang mendapat pengetahuan.\*)

(Amsal 3:13)



---

<sup>\*)</sup> Diterjemahkan dari bahasa Gerika kepada Bahasa Indonesia. Lembaga-Lembaga Alkitab jang Berkerdjasama, Djakarta 1954, 1965 ...Dari Alkitab Bode (PB) dan Klinkert (PL)

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Monjy minomahasetra

NIM : 100910101077

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “ **Peran Southern African Development Community (SADC) dalam mengatasi krisis di Zimbabwe**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan,

Monjy Minomahasetra

NIM: 100910101077

SKRIPSI

PERAN SOUTHERN AFRICAN DEVELOPMENT COMMUNITY  
(SADC) DALAM MENGATASI KRISIS DI ZIMBABWE

Oleh

Monjy Minomahasetra

NIM: 100910101077

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dra.Sri Yuniati, M,si

Dosen Pembimbing Kedua : Suyani Indriastuti, S.Sos.,M.Si

## RINGKASAN

**Peran Southern African Development Community (SADC) dalam mengatasi krisis di Zimbabwe;** Monjy Minomahasetra, 100910101077, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Krisis di Zimbabwe derawal paska pemilu anggota parlemen dan Presiden pada 29 Maret 2008. Kekalahan Robert Mugabe dan partai politiknya *Zimbabwe African National Union- Patriotic Front* (ZANU-PF) oleh Morgan Tsvangirai dan partainya *Movement for Democratic Change* (MDC), menjadi masalah karena Robert Mugabe tidak mau mengakui kekalahannya. Zimbabwe adalah satu negara anggota *Southern African Development Community* (SADC) maka SADC mengambil peran sebagai mediator dan melaksanakan *peacebuilding* untuk mengatasi krisis di Zimbabwe.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif-deskriptif. Maksudnya dengan kualitatif-deskriptif adalah data-data yang dikumpulkan akan dianalisa sehingga dapat memberi gambaran dan penjelasan keadaan subyek atau obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada sebagaimana adanya secara mendalam, guna mendapatkan penjelasan dan kesimpulan yang baik.

Hasil penelitian yang diambil dari skripsi ini adalah bahwa peran SADC dalam mengatasi krisis di Zimbabwe adalah sebagai mediator dalam mengadakan pertemuan-pertemuan antara pihak yang berkonflik dan membatuh mengformulasikan perjanjian. SADC juga berperang dalam mengadakan *peacebuilding* sejak tahun 2008 hingga 2013. Hasil dari peran SADC di Zimbabwe adalah sebuah perjanjian yang bernama *Global Political Agreement* (GPA) dimana isi perjanjian tersebut meliputi pembagian kekuasaan antar ZANU\_PF dan MDC. Dari perjanjian GPA pemilihan referendum konstitusional di selenggarakan pada 16 Maret 2013 dan pemilihan Presiden pada tanggal 31 Juli 2013 dimana SADC mengesahkan pemilu tersebut pada 18 Agustus 2013.



## PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Peran Southern African Development Community (SADC) dalam mengatasi krisis di Zimbabwe”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

- 1- Dra. Sri Yuniati, M.Si., selaku ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi utama yang telah meluangkan waktu, serta memberikan kritik dan saran, selama penulisan skripsi ini;
- 2- Suyani Indriastuti, S. Sos., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hubungan Internasional sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi kedua yang telah memberikan saran dan motivasi kepada penulis selama penulisan Skripsi ini;
- 3- Drs, Himawan Bayu Ptriadi, M.A, Ph.D., selaku Dosen Pembimbing akademik yang telah memberikan saran dan motivasi kepada penulis selama menempuh masa studi
- 4- Seluruh dosen, staf, dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian skripsi ini;
- 5- Orang tua penulis yang telah memberikan semangat, doa dan kasih sayangnya demi terselesaikannya skripsi ini;
- 6- Teman-teman Jurusan Ilmu Hubungan Internasional 2010 yang telah memberikan kesan, bantuan, persahabatan dalam suka dan duka;
- 7- dan semua pihak yang telah membantu, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terimakasih banyak



Dalam penulisan skripsi ini tentu masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember,

Penulis



DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	
1.2.1 Batasan Materi.....	5
1.2.2 Batasan Waktu.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Rumusan Masalah.....	5
1.5 Kerangka Dasar Teori	
1.5.1 Konsep Mediasi.....	6
1.5.2 Konsep Peacebuilding.....	9

1.6. Argumen Utama.....	14
1.7 Metode Penelitian	
1.7.1 Metode Pengumpulan data.....	14
1.7.2 Metode Analisa Data.....	15
1.8 Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II Krisis Di Zimbabwe</b>	
2.1 Gambaran umum.....	17
2.2 Sistem politik dan pemerintahan Zimbabwe.....	19
2.3 Interest Groups di Zimbabwe.....	22
2.4 Sistem kepartaian di Zimbabwe.....	23
2.5 Sistem pemilu di Zimbabwe.....	26
2.6 Krisis politik di Zimbabwe tahun 2008.....	30
2.6.1 Dampak krisis di bidang politik.....	34
2.6.2 Dampak krisis di bidang ekonomi.....	36
2.6.3 Dampak krisis di bidang sosial.....	41
<b>BAB III Gambaran Umum Southern African Development Community (SADC)</b>	
3.1 Sejarah dan Tujuan SADC.....	44
3.2 Struktur SADC.....	46
3.2.1 Summit of heads of state and Government.....	46
3.2.2 The Troika.....	47
3.2.3 Concil of Ministers.....	47
3.2.4 Standing Committee of Officials.....	47

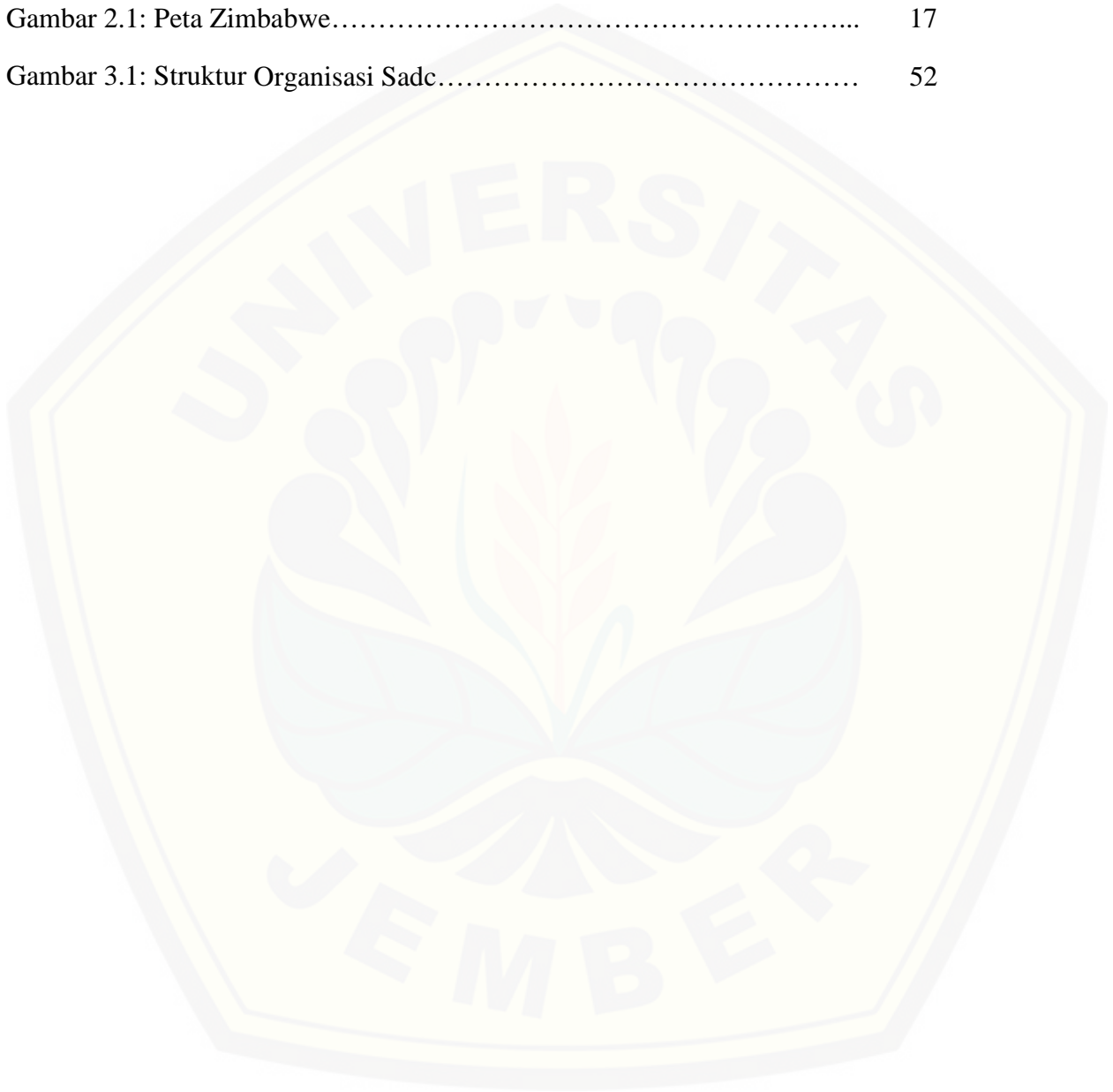
3.2.5 SADC National Committees.....	48
3.2.6 Sekretariat.....	48
3.2.7 Organ on Defense, Politics and Security cooperation....	49
3.2.8 Tribunal.....	49
3.2.9 Inter-state Defence and Security Committee (ISDSC)...	50
3.3 Development of the SADC organ for politics, defense and security.	53
3.4 Decision Making Process SADC untuk melaksanakan mediasi di Zimbabwe.....	54
<b>BAB IV Peran SADC dalam penyelesaian konflik di Zimbabwe</b>	
4-1 Peran SADC sebagai mediator konflik di Zimbabwe	
4-1-1 SADC mendorong komunikasi antara pihak-pihak yang berkonflik.....	56
4-1-2 SADC Membantu pihak-pihak yang berkonflik dalam menformulasikan perjanjian perdamaian Global Political Agreement (GPA).....	60
4.2 Peran SADC dalam proses peacebuilding di Zimbabwe	
4.2.1 Rekomendasi SADC.....	67
4.2.2 Pengawasan SADC dalam pemilu di Zimbabwe tahun 2013..	69
4.2.3 Pertemuan SADC minta Barat cabut sanksi atas Zimbabwe...	71
4-3 Hambatan SADC dalam penyelesaian krisis di Zimbabwe.....	72
4.4 Efektivitas peran SADC dalam penyelesaian krisis di Zimbabwe.....	73
<b>BAB V Kesimpulan.....</b>	<b>76</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 2.1 : Agama dan suku di Zimbabwe.....	18
Tabel 2.2: Perubahan dalam Konstitusi Zimbabwe.....	20
Tabel 2.3: Hasil pemilu putaran pertama.....	33
Tabel 2.4: Hasil pemilu putaran kedua.....	33
Tabel 2.5 Persentase Produk Ekspor-Impor Zimbabwe.....	39
Tabel 3.1 Negara-negara anggota SADC.....	45
Tabel 4.1: Perjanjian pembagian kekuasaan dan Agenda kebijakan.....	62
Tabel 4.2 : Efektivitas peran SADC dalam penyelesaian krisis di Zimbabwe....	74

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Konsep mediasi dan peacebuilding.....	13
Gambar 2.1: Peta Zimbabwe.....	17
Gambar 3.1: Struktur Organisasi Sadc.....	52



## DAFTAR SINGKATAN

- ANC = African National Congress
- AS = Amerika Serikat
- CAZ = Conservatif Alliance Zimbabwe
- CARE = Cooperative for Assistance and Relief Everywhere
- COPAC = Constitution Parliamentary Affairs Committee
- DPR = Dewan Perwakilan Rakyat
- DRC = Democratic Republic of Congo
- GPA = Global Political Agreement
- HAM = Hak Azasi Munusia
- ISDSC = Interstate Defence and Security Committee
- JOMIC = Join Monitoring and Implementation Commission
- KKT = Konferensi Tingkat Tinggi
- LSM = Lembaga Swadaya Masyarakat
- MDC = Mouvment for Democratic Change
- PBB = Perserikatan Bangsa Bangsa
- RFP = Republic Front Party
- SADC = Southern African Development Community
- SADCC = Southern African Development Co-ordination
- SIPO = Strategic Indicative for Organ



SSR = Security Sector Reform

TPS = Tempat Pemungutan Suara

UUD = Undang-Undang Dasar

UANC = United African National Council

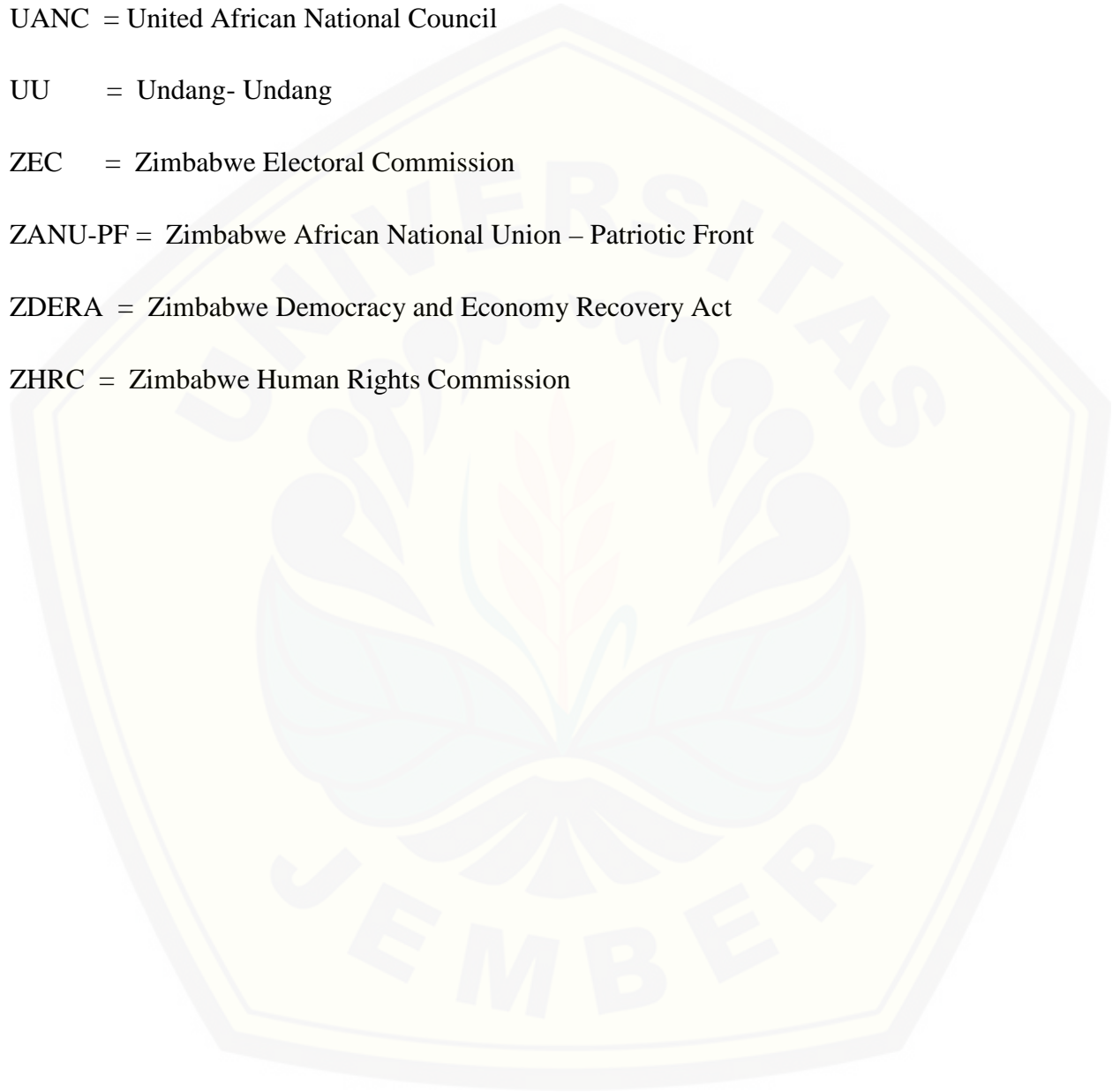
UU = Undang-Undang

ZEC = Zimbabwe Electoral Commission

ZANU-PF = Zimbabwe African National Union – Patriotic Front

ZDERA = Zimbabwe Democracy and Economy Recovery Act

ZHRC = Zimbabwe Human Rights Commission



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Peta Zimbabwe dan negara-negara anggota SADC

Lampiran 2: Pihak yang berlawanan dan kekerasan yang terjadi di Zimbabwe.

Lampiran 3: Inflasi uang Zimbabwe

Lampiran 4: Global Political Agreement



## Bab 1

### Pendahuluan

#### 1.1 Latar belakang

Negara Republik Zimbabwe merupakan sebuah negara di Afrika bagian selatan. Negara yang terkurung daratan (land lock) tersebut berbatasan dengan Negara Afrika Selatan di sebelah selatan, Botswana di barat, Zambia di utara dan Mozambik di timur dan timur laut. Secara historis, Zimbabwe sebelum merdeka dikenal sebagai Rhodesia Selatan. Wilayah tersebut dikelola oleh British South African Company dengan dasar piagam Kerajaan Inggris pada tahun 1899 sampai dengan tahun 1923 di mana Inggris secara sah menganeksasi wilayah tersebut untuk menjadi bagian dari kerajaan Inggris. Pada Juli 1961 dikeluarkanlah referendum untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar (UUD) baru di Rhodesia Selatan yang diikuti oleh hampir seluruh warga kulit putih di wilayah tersebut dan telah mendapat persetujuan dari kerajaan Inggris. Namun, Majelis Umum-Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1962 menyatakan bahwa Rhodesia Selatan sebagai wilayah yang tidak memiliki pemerintahan sendiri sesuai dengan Bab IX Piagam PBB. Setelah melalui serangkaian pembicaraan *di London*, Zimbabwe mendapatkan kemerdekaannya dengan mendapatkan persetujuan kerajaan Inggris pada tanggal 21 Desember 1979.

Setelah Zimbabwe memperoleh kemerdekaannya, pemerintahan negara ini diselenggarakan dengan bentuk parlementer di mana perdana menteri merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Robert Mugambe menjadi pendana menteri Zimbabwe pertama. Dalam perkembangannya, Sistem pemerintahan Zimbabwe mengalami perubahan jabatan pemimpin pada tanggal 31 Desember 1987 di mana jabatan perdana menteri diganti dengan jabatan presiden. Oleh karena itu, Zimbabwe menjadi negara dengan bentuk republik dan memiliki sistem

pemerintahan semi presidensial, di mana presiden tidak hanya memiliki peran sebagai kepala Negara, tetapi juga sebagai kepala pemerintahan.<sup>1</sup> Robert Mugabe juga terpilih sebagai presiden Zimbabwe yang pertama setelah perubahan jabatan kepemimpinan tersebut.

Masa pemerintahan Robert Mugabe telah berjalan hampir tiga dekade (selama 28 tahun). Ia telah memimpin Zimbabwe sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2008. Namun dibawah pemerintahan Robert Mugabe, Zimbabwe terus mengalami kemerosotan. Berbagai macam permasalahan negara seperti bencana kelaparan, pengungsi dan krisis ekonomi tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah Robert Mugabe. Bahkan Zimbabwe menjadi negara dengan tingkat inflasi tertinggi di dunia. Di samping itu, Zimbabwe juga mengalami krisis politik terkait dengan kekuasaan Robert Mugabe<sup>2</sup>.

Kondisi politik di Zimbabwe mulai mengalami krisis setelah pemilu pada tahun 2008. Krisis politik tersebut disebabkan oleh adanya persaingan antara Robert Mugabe dan Morgan Tsvangirai. Pemilu 2008 dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Maret 2008. Dalam pemilu tersebut, sebanyak hampir enam juta orang telah ikut berpartisipasi dengan memberikan suara. Secara umum, pemilu di Zimbabwe tersebut telah berlangsung damai tetapi menurut pemantau internasional, pelaksanaannya masih dinilai lamban. Dalam pemilu putaran pertama, Morgan Tsvangirai dinyatakan sebagai pemenang dengan hasil 47.9% dari jumlah total suara. Sedangkan saingannya, Robert Mugabe, hanya memperoleh 43.2% suara. Dengan perolehan tersebut, komisi pemilihan umum di Zimbabwe atau biasa dikenal sebagai *Zimbabwe Electoral Commission* (ZEC) akan menggelar pemilihan putaran kedua guna menentukan siapa yang berhak menjabat sebagai presiden Zimbabwe. Hal tersebut harus dilakukan karena perolehan suara masing-masing calon presiden belum mencapai ketentuan yang

---

<sup>1</sup> Glorier International, Inc. 1998. *Negara dan bangsa jilid 2*. Jakarta: PT Widyadara. Hal. 126

<sup>2</sup> *Ibid.* Hal 130

ditetapkan yaitu belum mampu melampaui batas minimal 50% suara<sup>3</sup>. Pemilu putaran kedua dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2008<sup>4</sup>.

Pemilu presiden putaran kedua terancam tidak akan dilaksanakan. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya teror-teror yang dilakukan Mugabe bersama para pengikutnya seperti penangkapan para aktifis *Movement for Democratic Change* (MDC). MDC merupakan partai politik Morgan Tsvangirai. Ia merupakan seorang tokoh oposisi yang ingin menyampaikan perubahan di Zimbabwe menjadi sebuah negara yang lebih demokratis. Di sisi lain, Presiden Robert Mugabe, mempersiapkan diri untuk menghadapi pemilihan ulang dengan melakukan kampanye teror. Mugabe memberikan teror, baik secara fisik maupun spiritual, kepada warga yang memberikan suara kepada MDC. Sejak pemilihan tahap awal, pemerintahan Robert Mugabe melancarkan aksi teror terhadap simpatisan oposisi lebih dari 200 orang tewas, 10 ribu orang cedera, 200 ribu orang terpaksa bersembunyi dan 20 ribu rumah hancur. Adapun kejadian hal seperti itu kerap terulang saat pelaksanaan pemilu presiden di Zimbabwe<sup>5</sup>.

Krisis di Zimbabwe dapat berimbas negatif terhadap negara tetangganya terutama di bidang ekonomi. Afrika Selatan dan Botswana menjadi khawatir karena dengan adanya krisis politik di Zimbabwe akan meningkatkan jumlah pengungsi di kedua negara tersebut. Selain itu, ada juga kekhawatiran di semua negara-negara *The Southern African Development Community* (SADC) tentang hal yang sama seperti kekhawatiran kedua negara Afrika tersebut. Bahkan mereka mengancam tidak akan menerima para pengungsi asal Zimbabwe dengan baik. Hal tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa tibanya pengungsi asal Zimbabwe akan menyebabkan *xenophobia*, maksudnya adalah *Xenophobia* merupakan salah

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Anonim. tanpa tahun. <http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/crises/crisis-in-zimbabwe> [diakses pada 19 november 2013]

<sup>5</sup> *Ibid.*



satu jenis phobia yang terjadi pada seseorang ketika dia bertemu dengan orang asing yang baru dia temui atau orang asing yang biasa dia temui.<sup>6</sup>

*Southern African Development Community* (SADC) merupakan sebuah organisasi regional di kawasan Afrika bagian selatan dan mempunyai 15 negara anggota yaitu: Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambika, Swaziland, Tanzania, Madagaskar, Seychelles, Zambia, Zimbabwe, Namibia, Afrika Selatan, Mauritius dan Republik Demokratik Kongo. SADC memainkan peran sebagai mediator sengketa antarnegara anggota. Zimbabwe adalah salah satu anggota organisasi regional SADC, maka SADC diwajibkan berusaha untuk menyelesaikan krisis tersebut agar tidak berimbas negatif ke negara yang lain dan merusak perekonomian organisasi regional tersebut.<sup>7</sup> Dalam penyelesaian krisis yang terjadi di Zimbabwe SADC mengambil peran sebagai mediator antara pihak yang berkonflik yaitu MDC dan ZANU-PF, sekaligus membangun *peacebuilding* di negara tersebut.

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, SADC selalu berusaha memberikan kontribusi positif dalam konflik-konflik termasuk yang terjadi di Zimbabwe. Melihat fenomena yang terjadi, maka penulis tertarik untuk meneliti “ **Peran Southern African Development Community (SADC) dalam mengatasi krisis di Zimbabwe tahun 2008**”

## 2.1 Ruang lingkup pembahasan

Ruang lingkup pembatasan merupakan *point* penting dalam penulisan sebuah karya ilmiah. Fungsi dari adanya ruang lingkup pembahasan adalah pengontrol karya tulis agar lebih fokus dan tidak melebar. Adapun ruang lingkup pembahasan dibagi menjadi dua yaitu, batasan materi dan batasan waktu.

---

<sup>6</sup> Anonim. tanpa tahun. <http://www.amazine.co/25199/apa-itu-xenophobia-fakta-sejarah-informasi-lainnya/> [diakses tanggal 26 November 2013]

<sup>7</sup> Anonim. tanpa tahun. <http://www.queensu.ca/samp/sampresources/samppublications/policyseries/policy25.htm> [diakses tanggal 26 November 2013]

### **2.1.1 Batasan Materi**

Penulis membatasi materi dalam skripsi ini adalah peranan SADC sejak terjadi krisis politik di Zimbabwe sampai dengan berakhirnya misi SADC di Zimbabwe.

### **2.1.2 Batasan Waktu**

Batasan waktu yang penulis gunakan adalah dimulai pada Maret 2008, awal krisis Zimbabwe paska pemilihan presiden pada 29 Maret 2008 dengan sampai pernyataan SADC tentang pemilu di Zimbabwe pada 2 Agustus 2013.

Walaupun penulis telah menetapkan ruang lingkup pembahasan, namun tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk memasukkan beberapa variabel serta fenomena di luar lingkup pembahasan yang sudah penulis tetapkan. Hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan permasalahan secara terinci dan komprehensif, sehingga fenomena yang di luar pembahasan menjadikan sebuah latar belakang dan penjelasan bagi analisa yang dilakukan.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui peran SADC dalam mengatasi krisis di Zimbabwe sejak tahun 2008 sampai 2013.

## **1.4 Rumusan Masalah**

Sebuah karya ilmiah dituntut untuk dapat memaparkan hal yang menjadi pokok permasalahan. Permasalahan merupakan hal mendasar dan harus dibuat dalam setiap penelitian ilmiah. Perumusan masalah akan membantu penulis dalam menentukan fokus pembahasan dalam sebuah penulisan karya ilmiah. Suatu penelitian ilmiah berangkat dari permasalahan yang muncul dalam benak kita sebagai manusia dalam bentuk serangkaian pertanyaan yang memerlukan jawaban. Berdasarkan latar belakang, ruang lingkup pembahasan dan tujuan di



atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang perlu dikaji dalam penulisan ini adalah: **“Bagaimana peran SADC dalam mengatasi krisis politik di Zimbabwe tahun 2008 ?”**

## **1.5 Kerangka Dasar Teori**

Dalam penulisan karya ilmiah diperlukan kerangka teori atau konsep yang relevan untuk dapat menjawab rumusan permasalahan. Kerangka tersebut berfungsi sebagai pisau analisa yang digunakan untuk membedah dan menerangkan suatu fenomena hubungan internasional. Oleh karena itu, suatu fenomena yang menjadi permasalahan utama dalam skripsi ini dapat dianalisis secara lebih mendalam dengan menggunakan kerangka teori atau konsep. Berkaitan dengan rumusan masalah yang diangkat penulis dalam tulisan ini, penulis menggunakan konsep mediasi dan konsep *Peace Building*.

### **1.5.1 Konsep Mediasi**

Pada abad ke dua puluh mediasi menjadi praktek atau disiplin yang bertujuan untuk menentukan intervensi dari pihak ketiga dalam memfasilitasi aliran informasi, mengklarifikasi atau memulihkan hubungan. Pihak ketiga harus bersikap netral, independen dan berfungsi sebagai perantara dalam menyelesaikan konflik atau pertentangan pihak-pihak terkait. Definisi kegiatan ini sangat bervariasi tergantung dari aplikasinya. Namun secara umum, praktek campur tangan pihak ketiga sebagai mediator dilakukan dengan memfasilitasi hubungan, memberi pemahaman situasi dan unsur-unsur pedagogi serta meningkatkan kualitas relasionalitas pihak-pihak yang bersengketa. Menurut Alison Yarnold Taylor:

“Cara yang paling berguna untuk melihat mediasi adalah untuk melihatnya sebagai sebuah proses intervensi pemecahan masalah yang diarahkan pada tujuan; memiliki tahap diprediksi yang menggunakan serangkaian teknik untuk menyelesaikan tugas-tugas

tertentu dan proses yang terbatas dan menghasilkan hasil yang spesifik”<sup>8</sup>

Berdasarkan definisi di atas, tujuan dasar Mediasi menurut B Bercovitch, J. (1984) antara lain sebagai berikut, <sup>9</sup>

- a. Pengurangan kecemasan dan efek negatif lain dari situasi konflik dengan membantu pihak menyusun resolusi konsesual
- b. Persiapan pihak untuk menerima konsekuensi dari keputusan mereka sendiri;
- c. Produksi kesepakatan (rencana) untuk masa depan yang semua pihak dapat menerima.

Selanjutnya, menurut B Bercovitch (1990), mediasi merupakan bentuk paling umum dari intervensi pihak ketiga. Namun dalam praktiknya, mediasi memerlukan persetujuan dari pihak-pihak yang berkonflik dan mendorong mereka dalam penyelesaian konflik secara damai. Bentuk dan karakter mediasi dalam sengketa internasional ditentukan oleh banyak faktor. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain yaitu sifat dari sengketa, sifat mediator, dan sejumlah variabel budaya. Mediasi secara luas didefinisikan sebagai suatu proses pengelolaan konflik di mana pihak yang berselisih mencari bantuan atau menerima tawaran bantuan dari individu, kelompok, negara, atau organisasi untuk menyelesaikan konflik mereka atau menyelesaikan perbedaan dasar mereka tanpa menggunakan kekuatan fisik atau menyerukan otoritas hukum. Mediasi dianggap berhasil ketika proses tersebut menghasilkan solusi untuk menyelesaikan sengketa. Keberhasilan mediasi ditandai dengan adanya ceasefire dan penghentian permusuhan pihak-pihak yang bersengketa. Namun sebaliknya, mediasi dianggap tidak berhasil ketika mereka tidak memiliki dampak yang jelas pada sengketa<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> Anonim . tanpa tahun. <http://www.pa-rantauprapat.net/index.php/2013-06-14-01-22-11/ket-62> [ Diakses pada 28 November 2014]

<sup>9</sup> B Bercovitch, J. (1984). *Social conflicts and third parties: Strategies of conflict resolution*. Boulder, Colo.: Westview Press. Berco Bercovitch, page5

<sup>10</sup> Jacob Bercovitch , 1990 “International Mediation and Dispute Settlement Evaluating the Conditions for Successful Mediation” The International Society of Political Psychology, Washington, D.C . page 4

Mediator dalam mediasi menurut B Bercovitch, J. (1990), menggunakan tiga strategi. Adapun ketiga strategi tersebut antara lain; strategi komunikasi, formulasi dan manipulasi. Pada tahap komunikasi dibentuk komunikasi-komunikasi untuk membangun kesamaan persepsi. Selain itu, tahap tersebut berguna untuk menurunkan eskalasi konflik dan membawa kedua belah pihak untuk bersepakat dalam perundingan yang lebih bertujuan maju yaitu penyelesaian masalah. Sedangkan strategi formulasi merupakan strategi untuk mengatur pengaturan mediasi dan protokol, membentuk agenda, mengendalikan waktu dan mempertahankan fokus pihak-pihak yang berkonflik, menunjukkan konsesi pilihan dan usulan penyelesaian konflik. Kemudian strategi yang ke tiga adalah strategi manipulasi. Strategi tersebut diartikan sebagai suatu strategi dengan upaya menetapkan negosiasi, mengubah harapan mereka, menekan mereka supaya menjadi lebih fleksibel, menyaring informasi, menambah insentif atau mengancam hukuman, dan bahkan dapat mengancam pihak-pihak yang bersengketa dengan menarik diri pihak ke tiga dari hubungan ketiganya. Strategi-strategi tersebut memfasilitasi mediator untuk melakukan kontrol yang lebih formal atas proses mediasi sehubungan dengan aspek lingkungan pengelolaan konflik.<sup>11</sup>

Disamping itu menurut Chester A. Crocker, Fen Osler ampson, and Pamela Aall, (2001), mediator dapat mengontrol berlangsungnya mediasi, seberapa sering para pihak bertemu, bagaimana agenda yang terstruktur dan informasi tentang kemajuan mediasi. Aspek lain dari strategi-strategi ini meliputi politik domestik negara yang terlibat dan publisitas media. Strategi-strategi ini juga adalah bentuk yang paling kuat dalam intervensi karena mediator bisa mempengaruhi isi dan substansi dari proses tawar-menawar dengan memberikan insentif bagi pihak-pihak atau mengeluarkan ultimatum<sup>12</sup>. Dalam perannya sebagai mediator di Zimbabwe, SADC tidak menggunakan manipulasi terhadap pihak yang berkonflik

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Chester A. Crocker, Fen Osler ampson, and Pamela Aall, 2001, *turbulent Peace* "The challenges of Managing International Conflict" United States Institute Of Peace Press, Washintong, D.C.

maka penulis hanya memakai strategi komunikasi dan strategi formulasi dalam tulisan karya ilmiah ini.

### 1.5.2 Konsep *Peacebuilding*

Fase kedua dalam peran SADC di Zimbabwe adalah *peacebuilding*. Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh Bhoutros-Bhoutros Ghali, mantan Sekretaris Jendral PBB pada tahun 1992 dalam konsep resolusi konflik yang meliputi: Peace-making, Peace-keeping dan Peace-building. Dalam karya ilmiah ini, penulis akan menggunakan hanya konsep *peacebuilding* dikarenakan peran SADC di Zimbabwe lebih fokus ke konsep tersebut. Menurut Bhoutros-Bhoutros Ghali (dikutip dari “Chester A. Crocker, Fen Osler ampson, and Pamela Aall, 2001”) definisi dari *peacebuilding* adalah,

*“Comprehensive efforts to identify and support structures which will tend to consolidate peace and advance a sense of confidence and well-being among people. Through agreements ending civil strife, these may include disarming the previously warring parties and the restoration of order, the custody and possible destruction of weapons, repatriating refugees, advisory and training support for security personnel, monitoring elections, advancing efforts to protect human rights, reforming or strengthening governmental institutions and promoting formal and informal processes of political participation”*<sup>13</sup>

Menurut Bhoutros-Bhoutros Ghali,

“ Peacemaking dan peacekeeping dibutuhkan untuk mencegah konflik dan mempertahankan perdamaian jika kondisi tersebut telah tercapai. Jika sukses, keduanya akan memperkuat kesempatan untuk *peacebuilding* pasca-konflik, yang mana dapat mencegah kemunculan kembali kekerasan diantara individu dan negara.”<sup>14</sup>

Dari definisi di atas dapat kita lihat bahwa *peace-building* adalah proses pembentukan perdamaian yang tertuju pada implementasi praktis perubahan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Anonim, Tanpa tahun.

[https://www.academia.edu/1144076/Peacebuilding dan Resolusi Konflik dalam perspektif PBB](https://www.academia.edu/1144076/Peacebuilding_dan_Resolusi_Konflik_dalam_perspektif_PBB) [diakses pada 04 Mei 2014]



sosial secara damai melalui rekonstruksi dan pembangunan politik, sosial dan ekonomi.

Strategi *peace-building* memiliki tiga tahapan waktu yang meliputi *short-term* (jangka waktu 2 bulan sampai dengan 2 tahun), *mid-term* (jangka waktu 2 sampai dengan 5 tahun), *long-term* (jangka waktu 5 sampai dengan 10 tahun). Selain itu, strategi *peace-building* juga mencakup berbagai dimensi seperti politik, ekonomi, sosial dan internasional. *Peace-building* umumnya dilakukan oleh aktor domestik seperti masyarakat, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Namun tidak dipungkiri bahwa aktor eksternal seperti organisasi internasional, negara donor, dan *international non-governmental organizations* (INGO's) juga dapat memiliki peranan penting dalam memfasilitasi dan mendukung upaya *peace-building*.<sup>15</sup>

*Peace-building* dalam proses perdamaian dibagi dua tahap yaitu tahap transisi dan tahap konsolidasi. *Peace-building* merupakan tahapan terberat dan akan memakan waktu paling lama karena memiliki orientasi struktural dan kultural. Pada tahap transisi, *governance-based approach* merupakan suatu pendekatan yang dominan untuk digunakan. Pendekatan tersebut sangat menekankan penerapan model Grotian dan Kantian tentang pemulihan norma-norma liberal untuk memulihkan *civil society*. Model Grotian dan Kantian menempatkan institusi demokrasi dan pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai prioritas utama. Kaum Grotian melandaskan diri pada konsep *societas quasi politica et moralis* yang diperkenalkan oleh Fransisco Suares. Konsep ini menganggap negara sebagai suatu entitas politik semu dan semi-barbarian yang harus membuat suatu kontrak sosial berupa standar-standar normal yang akan mengatur hubungan antar negara. Masalah utama dari ide ini adalah keharusan untuk menyeragamkan doktrin dasar negara dan program perdamaian.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*p3

<sup>16</sup> *Ibid.*p4

Uniformitas ide perdamaian dari *peace-building* akan menemui batu sandungan, terutama ketika ide tersebut akan diaplikasikan untuk menangani masalah-masalah kemanusiaan yang terjadi karena pecahnya konflik internal. Hal ini disebabkan oleh tiga faktor yaitu,

- a. uniformitas perdamaian tidak memberikan kesempatan kepada komunitas lokal untuk mengembangkan sendiri alternatif-alternatif penyelesaian konflik yang cocok untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi;
- b. uniformitas perdamaian berusaha diadopsi secara langsung oleh negara-negara yang memiliki konteks struktur masyarakat yang berbeda dan
- c. gagasan normatif kaum liberal seringkali tidak mengindahkan pentingnya faktor *power politics* yang cenderung berperan negatif baik dalam proses demokratisasi maupun dalam stabilisasi proses perdamaian.

Tahap *kedua* dari proses *peace-building* adalah tahap konsolidasi. Dalam tahap konsolidasi ini, semboyan kaum realis “*si vis pacem, para bellum*” (jika menginginkan perdamaian persiapkan mesin perang harus dibuang jauh-jauh) digantikan dengan semboyan “*Quo Desiderat Paceh, Praeparet pacem*” (jika menginginkan perdamaian, persiapkan perdamaian). Tantangan *peace building* pasca perjanjian damai mencegah keterlibatan aktor pelaku konflik merupakan tugas politik yang harus dilakukan dan paling penting dilakukan oleh para pembangun perdamaian. Semboyan ini mengharuskan aktor-aktor yang relevan untuk terus-menerus melakukan intervensi perdamaian terhadap struktur sosial dengan tujuan yaitu mencegah terulangnya kembali konflik yang melibatkan kekerasan bersenjata serta merekonstruksikan proses perdamaian yang dapat dijalankan sendiri oleh pihak-pihak yang bertikai.<sup>17</sup>

kedua tahap *peace-building* dapat dicapai dengan merancang dua kegiatan. Kegiatan pertama adalah mengoperasionalkan indikator sistem peringatan dini (*early warning system*). Indikator tersebut harus terkait dengan variasi sumber konflik lokal. Sistem peringatan dini ini diharapkan dapat

---

<sup>17</sup> *Ibid.*p6

menyediakan ruang manuver yang cukup luas bagi beragam aktor *peace-building* dan memperkecil kemungkinan penggunaan kekerasan bersenjata untuk mengelola konflik. Kemudian yang kedua adalah perlu dikembangkannya keberagaman mekanisme *peace-building* lokal yang melibatkan sebanyak mungkin aktor-aktor non-militer diberbagai tingkat eskalasi konflik. Aktor-aktor *peace-building* tersebut dapat saja melibatkan NGOs, mediator internasional, atau institusi keagamaan.<sup>18</sup>

Tentang elemen yang terlibat dalam pelaksanaan *peace-building*, komunitas internasional menyadari bahwa asistensi terhadap para pihak bertikai tidak hanya sebatas dalam perjanjian negosiasi damai saja, namun juga dalam mendorong dan konsolidasi perdamaian. Sehingga dalam mengimplementasikan kesepakatan damai, setiap unsur yang terlibat konflik harus diwujudkan dalam beberapa bagian yang meliputi : melucuti dan demobilisasi para kombatan, reintegrasi para pelaku perang ke masyarakat, demiliterisasi kekuatan militer, restrukturisasi dan reformasi sektor keamanan, penegakan HAM, mengembalikan pengungsi, reformasi sistem peradilan, pelaksanaan pemilihan umum, serta promosi bidang ekonomi dan sosial. Kapasitas setiap pihak untuk bertemu dan menyampaikan tuntutan yang sangat mendesak, memaksa institusi yang lemah dengan keterbatasan sumberdana dan keterpurukan ekonomi. Sebagai konsekuensinya setiap bagian mengharapkan kehadiran komunitas internasional sebagai donatur dan asistensi sebagai bentuk dukungan politik.<sup>19</sup>

Dalam jangka panjang aktivitas *peace-building* terdiri atas dukungan dari bermacam-macam aktor eksternal: badan politik regional dan internasional, operasi penjaga perdamaian internasional, perwakilan menteri pertahanan dan kedutaan besar negara sahabat, donor bilateral dan multilateral, dan NGOs. Hal ini menggambarkan cakupan wilayah dari para donor dan asosiasi NGOs dalam mendukung kesepakatan damai. Untuk mendukung hal ini aktivitas para donor dikategorikan dalam tiga kategori, yaitu:

---

<sup>18</sup> *Ibid.*p10

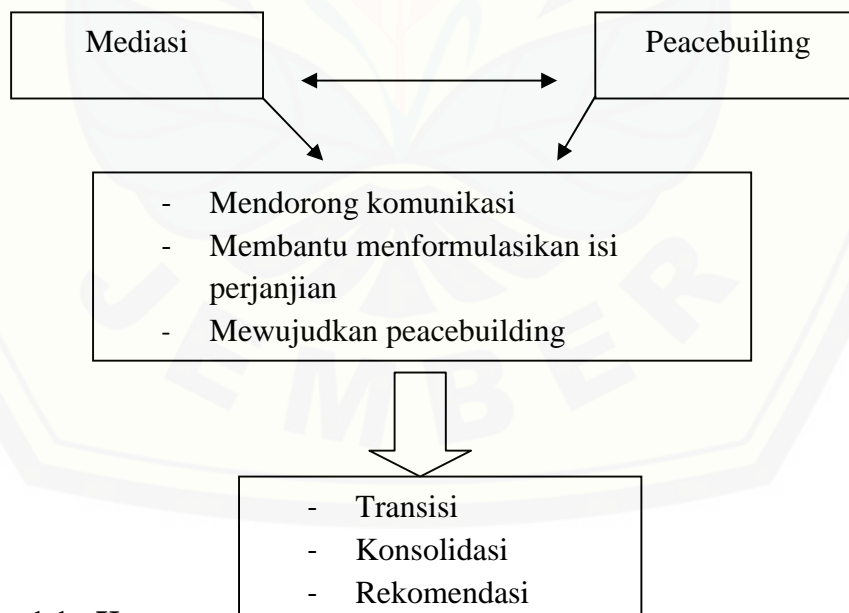
<sup>19</sup> *Ibid.*



- a. membangun institusi politik,
- b. konsolidasi sektor keamanan internal dan eksternal, dan
- c. revitalisasi promosi bidang ekonomi dan sosial.

SADC sebagai organisasi regional yang memiliki tujuan untuk mempertahankan keamanan di kawasannya memiliki kewajiban menyelesaikan krisis politik di Zimbabwe. Hal tersebut dilakukan karena krisis di Zimbabwe dapat melebar dan membawa dampak buruk bagi negara-negara tetangganya, bahkan kepada organisasi regional itu sendiri. Maka SADC melaksanakan mediasi dan sekaligus membangun *peace-building* dalam krisis di Zimbabwe pasca pemilu 29 Maret 2008 antara Robert Mugabe yang mewakili Partai *Zimbabwe African National Union – Patriotic Front* (ZANU-PF) dengan Morgan Tsvangirai dari Partai MDC yang merupakan kelompok oposisi terbesar di Zimbabwe.

Setelah penjelasan konsep-konsep yang di atas, yaitu konsep mediasi dan konsep Peacebuilding; penulis mendapat gambaran untuk mengalisis karya ilmiah ini sebagai berikut



**Gambar 1.1 : Konsep mediasi dan peacebuilding**

Sumber: [https://www.academia.edu/1144076/Peacebuilding dan Resolusi Konflik dalam perspektif PBB](https://www.academia.edu/1144076/Peacebuilding_dan_Resolusi_Konflik_dalam_perspektif_PBB) [diakses

## 1.6. Argumen Utama

Berdasarkan permasalahan dan kerangka pemikiran yang penulis ajukan, maka penulis mempunyai dugaan sementara bahwa peran SADC dalam mengatasi krisis di Zimbabwe adalah menjadi mediator bagi pihak-pihak yang berkonflik. Proses mediasi dilakukan dengan cara :

- 1- Mendorong komunikasi pihak-pihak yang berkonflik
- 2- Membantu memformulasikan isi perjanjian
- 3- Mewujudkan *peace-building* di Zimbabwe.

## 1.7 Metode Penelitian

Untuk menyelidiki permasalahan yang memerlukan jawaban dalam karya ilmiah ini, maka diperlukan metode penelitian. Metode penelitian menurut Rosady Ruslan adalah

*“merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya”<sup>20</sup>*

Berdasarkan penjelasan di atas, metode penelitian merupakan cara yang digunakan dalam sebuah karya tulis ilmiah guna memperoleh informasi dan menganalisisnya berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan adanya metode penelitian, sebuah karya tulis ilmiah akan menjadi lebih tersistematis dengan baik. Metode penelitian dibagi menjadi dua yaitu metode pengumpulan data dan metode analisis data.

### 1.7.1 Metode Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam setiap karya ilmiah, dilakukan penulis dengan melakukan penelitian secara tidak langsung yang berarti hasil pengamatan

---

<sup>20</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hal. 24

terhadap obyek yang diteliti dapat diperoleh melalui jurnal-jurnal, buku-buku, literatur-literatur, artikel dan pemberitaan oleh media massa sehingga data yang dikumpulkan bersifat tidak langsung atau disebut sekunder. Data yang tertuang dalam tulisan ini sepenuhnya merupakan hasil keputustakaan yang diperoleh dari

- 1- Perpustakaan Pusat Universitas Jember,
- 2- Perpustakaan FISIP Universitas Jember,
- 3- Situs internet,
- 4- Koleksi buku-buku pribadi,
- 5- Surat kabar, dan jurnal

### **1.7.2 Metode Analisa Data**

Untuk menganalisa data, penulis menggunakan metode kualitatif-deskriptif yaitu metode analisis dengan menganalisis data-data yang telah dikumpulkan sehingga dapat memberi gambaran dan penjelasan keadaan subyek atau obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada sebagaimana adanya secara mendalam, guna mendapatkan penjelasan dan kesimpulan yang baik. Penggunaan metode kualitatif didasarkan pada proses pengumpulan data-data tersebut bersifat sekunder dan tidak bisa diukur secara langsung. Metode ini juga digunakan untuk menganalisis fenomena-fenomena yang dikaji secara lebih mendalam. Sedangkan metode deduktif dijadikan sebagai penjelasan atau analisa mengenai fenomena-fenomena yang bersifat umum yang bersifat umum biasanya digunakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa khusus atau sebuah fakta yang konkret.

### 1.8 Sistematika Penulisan

Agar karya ilmiah ini dapat dipahami lebih jelas, maka penulis akan memaparkan sistematika penulisan bab selanjutnya sebagai berikut:

- Bab 1**, merupakan pendahuluan yang meliputi: ruang lingkup pembahasan, batasan materi, batasan waktu, tujuan penelitian, rumusan masalah, kerangka dasar teori, argumen utama, metode penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.
- Bab 2**, merupakan pembahasan Krisis di Zimbabwe: tentang kondisi umum Zimbabwe, sitem politik dan pemerintahan zimbabwe, sistem kepartaian dan pemilu, krisis pilitik di Zimbabwe dan dampak krisis politik zimbabwe secara global.
- Bab 3**, membahas tentang SADC yang meliputi profil dan struktur organisasi SADC, visi SADC, serta keputusan SADC untuk melaksanakan mediasi di Zimbabwe.
- Bab 4**, dalam Bab ini penulis akan membahas peran SADC dalam mengatasi krisis di zimbabwe.
- Bab 5**, merupakan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian/analisis data pada bab-bab sebelumnya.

## BAB II

### KRISIS DI ZIMBABWE

#### 2.1 Gambaran Umum

Republik Zimbabwe merupakan negara di benua Afrika yang berbatasan langsung dengan Afrika Selatan di bagian Selatan, Botswana di bagian Barat, Zambia di bagian Barat Daya, dan Mozambik di bagian Timur dan Timur Laut. Negara ini terletak di antara dua sungai yaitu Zambezi dan Limpopo. Secara geografis, Zimbabwe terletak pada garis 20° 0'0" LS dan 30° 0'0" BT. Negara ini memiliki luas wilayah 390.580 km<sup>2</sup> yang terdiri dari dataran tinggi subur dan pegunungan di sisi timur<sup>21</sup>.



**Gambar 2.1: Peta Zimbabwe**

Sumber: <http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/africa/zw.htm>

Zimbabwe terbagi atas 8 provinsi dengan jumlah penduduk sekitar 12.746.990 jiwa pada Juli 2005. Sebagian besar penduduk Zimbabwe tergolong miskin dengan tingkat persentase 80%. Negara ini juga terkenal dengan berbagai suku seperti Zulu, Vadoma, Shona, dan Lemba.<sup>22</sup>

<sup>21</sup>Anonim tanpa tahun. <http://africanhistory.about.com/od/zimbabwe/p/ZimbabweHist2.htm>  
[diakses pada tanggal 06 Januari 2014]

<sup>22</sup> *Ibid.*



Tabel 2.1 : Agama dan Suku di Zimbabwe

Agama	Persentase
Sinkretik	50%
Kristen	25%
Kepercayaan asli	24%
Islam	1%

Sumber: <http://africanhistory.about.com/od/zimbabwe/p/ZimbabweHist2.htm>

Suku	Persentase
Shona	82%
Ndebele	14%
Lainnya	2%
-	-

Sumber: <http://africanhistory.about.com/od/zimbabwe/p/ZimbabweHist2.htm>

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa agama mayoritas di Zimbabwe adalah Sinkretik dengan persentase sebesar 50%. Agama Kristen mencapai 25%, sementara itu sebesar 24% merupakan kepercayaan asli dan agama islam yang meliputi 1%. Sedangkan jika dilihat dari populasi suku yang ada di Zimbabwe, suku Shone merupakan suku mayoritas dengan persentase sebesar 82%, suku Ndebele dengan persentase 14% serta suku-suku lainnya sebesar 2%.

Republik Zimbabwe lahir sebagai negara merdeka pada 18 April 1980. Sebelum memperoleh kemerdekaannya, Zimbabwe dikenal dengan Rhodesia Selatan dibawah kendali *British South African Company* berdasarkan piagam Kerajaan Inggris tahun 1899. Pengaturan kendali ini berakhir pada tahun 1923 ketika Inggris menganeksasikan menjadi bagian dari kerajaan. Pada bulan Juli 1961 dikeluarkan referendum untuk mengesahkan Undang- undang Dasar (UUD) baru yang diikuti oleh hampir seluruh warga kulit putih dan mendapat persetujuan Inggris. Namun pada tahun 1962 Majelis Umum-PBB (MU-PBB) menyatakan bahwa Rhodesia Selatan sebagai wilayah yang tak berpemerintahan sendiri sesuai dengan Bab IX Piagam PBB<sup>23</sup>. Selama beberapa tahun MU-PBB meminta Inggris

<sup>23</sup> *Ibid.*

sebagai pemegang administrasi agar menunda UUD 1961 dan merumuskan UUD baru dengan prinsip satu orang satu suara, dan menyerukan kepada Inggris agar tidak memberikan kemerdekaan hingga pemerintah mayoritas terbentuk atas dasar hak memilih universal. Namun Inggris menganggap bahwa sejak tahun 1923 Rhodesia Selatan merupakan koloni yang telah memiliki pemerintahan sendiri dan menganggap PBB mengintervensi urusan dalam negeri wilayah tersebut<sup>24</sup>.

Pada tahun 1965 rezim minoritas (kulit putih) Rhodesia Selatan yang dipimpin oleh Ian Smith memproklamasikan kemerdekaan secara sepihak tetapi ditentang oleh Inggris. Selanjutnya pada 1 Maret 1970 Ian Smith kembali memproklamasikan kemerdekaan Rhodesia Selatan sebagai Republik, hal tersebut kemudian ditentang oleh Dewan Keamanan PBB. Hingga akhirnya gencatan senjata antara rezim minoritas dengan gerilyawan tercapai. Setelah gencatan senjata tercapai, dibentuklah serangkaian pembicaraan di London yang menghasilkan persetujuan yang ditandatangani pada 21 Desember 1979. Untuk lebih mengetahui tentang Zimbabwe, maka dalam karya ilmiah ini akan dijelaskan mengenai sistem politik di negara tersebut<sup>25</sup>.

## **2.2 Sistem Politik dan Pemerintahan Zimbabwe**

Zimbabwe adalah negara republik yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial, dimana Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden, sementara kekuasaan legislatif terdiri dari presiden dan parlemen. Konstitusi Zimbabwe lahir setelah adanya Perjanjian Lancaster House. Konstitusi tersebut mengalami beberapa kali perubahan seperti yang akan dijelaskan pada tabel berikut :

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*



**Tabel 2.2: Perubahan dalam Konstitusi Zimbabwe**

<b>Tahun</b>	<b>Perubahan</b>
1987	Penghapusan 29 kursi yang disediakan untuk orang kulit putih di parlemen; penghapusan kantor Perdana Menteri
1990	Penghapusan Senat dan penciptaan kursi majelis berdasarkan pengangkatan dan bukan karena dipilih
2005	Reintroduksi Senat

Sumber: <http://www.zimembassy.se/administration.html>

Tabel diatas menunjukkan bahwa konstitusi Zimbabwe telah mengalami beberapa kali perubahan (amandemen). Pertama pada taun 1987, perubahan konstitusi diantaranya penghapusan 29 kursi yang disediakan untuk orang kulit putih di parlemen dan juga penghapusan kantor Perdana Menteri. Perubahan konstitusi kedua terjadi pada tahun 1990, mengenai penghapusan senat dan penciptaan kursi majelis berdasarkan pengangkatan dan bukan karena dipilih. Perubahan konstitusi ketiga terjadi pada tahun 2005, perubahan tersebut adalah mengenai reintroduksi senat dalam sistem pemerintahan Zimbabwe.

Sistem politik dan pemeritahan Zimbabwe memiliki tiga lembaga kekuasaan yaitu: kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif<sup>26</sup>. Kekuasaan eksekutif di Zimbabwe dipegang oleh Presiden yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dipilih untuk jangka waktu lima tahun melalui pemilihan umum langsung. Dalam paragraf pertama Pasal 32 Konstitusi Zimbabwe, menyebutkan bahwa kekuasaan legislatif dilaksanakan bersama oleh Presiden Zimbabwe dan Parlemen. Sistem parlemen Zimbabwe adalah bikameral, terdiri dari majelis rendah atau *House of Assembly* dan majelis tinggi atau Senat. Pada tahun 1980 dan 1989 Senat memiliki 40 anggota, tetapi karena adanya amandemen konstitusi tahun 1990 keberadaan

<sup>26</sup> Anonim tanpa tahun. <http://www.zimembassy.se/administration.html> [diakses pada tanggal 06 janvier 2014]

Senat dihapus dan mengubah *House of Assembly* di parlemen dari sistem bikameral menjadi unikameral. Pada tanggal 14 September 2005 terjadi amandemen kembali konstitusi Zimbabwe. Hasil amandemen konstitusi antara lain mengembalikan kembali posisi Senat berdasarkan Pasal 38 dari konstitusi tersebut. Senat memiliki 66 anggota yaitu:

- 5 senator dipilih oleh suara mayoritas sederhana dalam satu putaran pada masing-masing dari 10 provinsi;
- 1 senator dipilih oleh sebuah perguruan tinggi dari kepala di masing-masing delapan provinsi non-metropolitan (tidak termasuk kota-kota Harare dan Bulawayo);
- 6 Senator ditunjuk oleh Presiden Zimbabwe.

Berdasarkan Pasal 38 dari konstitusi, DPR saat ini memiliki 150 deputi Majelis yaitu:

- 120 anggota terpilih dalam sebanyak satu konstituen mandat mayoritas dalam satu putaran;
- 10 gubernur provinsi (ditunjuk oleh Presiden Zimbabwe);
- 8 kepala dipilih oleh sebuah perguruan tinggi dari kepala di masing-masing delapan provinsi non-metropolitan (tidak termasuk kota-kota Harare dan Bulawayo);
- 12 anggota yang ditunjuk oleh Presiden Zimbabwe.

Perubahan konstitusi kembali terjadi pada tahun 2007 dan mulai berlaku tahun 2008 yang berakibat pada perubahan metode penunjukan di dua kamar (bikameral). Jumlah deputi sebanyak 150-210 yang semua dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah Senat terdiri dari 50-93 anggota, dimana 50 senator terpilih dari 10 provinsi diangkat sesuai dengan sistem yang sama, sedangkan presiden Zimbabwe menunjuk 43 senator yang lain. Kekuasaan yudikatif terdiri

dari para hakim Mahkamah Agung yang diangkat oleh presiden atas saran dari Komisi Yudisial.<sup>27</sup>

### 2.3 *Interest Groups* di Zimbabwe

Pemerintahan yang berkuasa di Zimbabwe pada era kemerdekaan tahun 1980 telah menghasilkan aparatur negara yang membawa kemajuan bagi negara. Pada akhirnya muncul pula kelompok kepentingan yang dapat menempatkan pemimpin baru di Zimbabwe dibawah berbagai macam tekanan yang saling bertentangan<sup>28</sup>. Salah satu contoh kelompok kepentingan yang ada di Zimbabwe adalah *Norwegian People's Aid* (NPA). Kelompok ini memiliki hubungan kemitraan dengan organisasi di tingkat lokal dan nasional Zimbabwe, serta di tingkat regional Afrika bagian Selatan. Para mitra mewakili berbagai kelompok kepentingan yang memobilisasi dan mengorganisasi untuk mengatasi krisis sosial-ekonomi dan politik di negara Zimbabwe. Program yang dikembangkan adalah mengenai masalah demokrasi dan distribusi sumber daya, serta mendukung program penguatan organisasi masyarakat. Penguatan organisasi tersebut adalah sebagai strategi untuk memberdayakan masyarakat dan komunitas dalam mempengaruhi kondisi di mana mereka tinggal. Bentuk kerja organisasi meliputi upaya lobi dan advokasi untuk menjadikan lingkungan yang lebih kondusif bagi masyarakat. Selain itu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program nasional utama seperti terlibat dalam proses reformasi konstitusi dan menjalankan hak untuk berorganisasi dan berkumpul. NPA juga bertujuan untuk mendukung pengembangan mitra organisasi dengan memperkuat sistem internal mereka dan dalam struktur pemerintahan. Hal ini akan memberikan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Anonym tanpa tahun.

<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00220389308422282#.UsvZVNIW22E> [diakses pada 06 Januari 2014]

kontribusi yang lebih baik kepada mitra organisasi yang diposisikan untuk melobi dan melibatkan negara<sup>29</sup>

#### 2.4 Sistem Kepartaian di Zimbabwe

Keberadaan partai politik di Zimbabwe memiliki peranan penting dalam memerangi dominasi rasial, sejak era pemerintahan minoritas kulit putih hingga pada saat kehidupan masyarakat yang lebih demokratis. *The Rhodesian Front Party* mendominasi politik di negara ini dari pembentukannya Maret 1962 sampai terbentuknya pemerintahan mayoritas pada tahun 1979. Program partai diantaranya menganjurkan pemisahan rasial, pembagian tanah secara rasial, dan perlindungan kulit putih Rhodesia. Partai ini memenangkan semua kursi di Majelis yaitu 20 kursi yang disediakan untuk kulit putih dalam pemilu tahun 1979 dan 1980. Pada tahun 1981 *The Rhodesian Front Party* merubah nama menjadi Front Partai Republik (RFP). Ian Smith yang menjabat sebagai perdana menteri, tetap menjabat sebagai pimpinan partai sampai diberhentikan dari parlemen pada tahun 1987. Posisinya kemudian digantikan oleh Mark Partridge dan nama partai kembali berubah menjadi *Conservative Alliance Zimbabwe (CAZ)*. CAZ memenangkan 15 dari 20 kursi yang dialokasikan untuk kulit putih dalam pemilu tahun 1985<sup>30</sup>.

Partai-partai utama yang ada di Zimbabwe berasal dari front perjuangan kemerdekaan seperti Zapu yang dibentuk pada bulan Desember 1961. Partai tersebut kemudian terpecah pada bulan Juli 1963 karena adanya pembentukan partai Zanu yang dipimpin Pendeta Ndabaningi Sithole, dan diteruskan oleh Robert Mugabe<sup>31</sup>. Setelah Uskup Abel Muzorewa menerima usulan pemerintah Smith untuk menyelesaikan masalah konsitusi internal tahun 1978, pengkiutnya yang dikenal dengan Dewan Nasional Amerika-Afrika (UANC) muncul sebagai

---

<sup>29</sup> Extracted from: Susan Booyesen and Lucien Toulou 2009 "Chapter 15: Zimbabwe" IN Denis Kadima and Susan Booyesen (eds) [Compendium of Elections in Southern Africa 1989-2009: 20 Years of Multiparty Democracy](#), EISA, Johannesburg, 640-642.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

salah satu partai besar di Zimbabwe. Pada pemilihan umum yang diselenggarakan tanggal 17-21 April 1979, UANC mendapatkan mayoritas 51 kursi di Majelis baru, dan Muzorewa menjadi perdana menteri. Di bawah naungan Inggris, konstitusi baru memperoleh persetujuan pada tahun 1979. Pemilu 27-29 Februari 1980 diikuti oleh sembilan partai yang berkompetisi termasuk Zanu-PF yang dipimpin oleh Robert Mugabe dan Zapu (yang terdaftar atas nama Front Populer). Dari 80 kursi Majelis yang dipilih melalui pemilihan umum, Zanu-PF memperoleh 57 kursi, Front Populer (atau Zapu) memperoleh 20 kursi, dan UANC memperoleh 3 kursi dalam majelis. Pada pemilu selanjutnya bulan Juli 1985, Zanu-PF memperoleh 63 kursi dan PF-Zapu 15 kursi. Setelah mengalami perselisihan selama tahun 1980-an, Zapu dan Zanu sepakat untuk bersatu pada akhir tahun 1987. Proses penyatuan kedua partai akhirnya terwujud pada tahun 1989 dengan nama Zanu-PF<sup>32</sup>.

Sebagai Presiden terpilih, Mugabe menginginkan adanya sistem satu partai dalam politik Zimbabwe. Partai baru yang bermunculan pada era akhir 1980-an dan awal 1990-an diharapkan untuk mempersiapkan diri pada pemilu tahun 1995. Di pemilu tahun 1990, Persatuan Gerakan Edgar Tekere Zimbabwe (ZUM) diperebutkan karena memiliki beberapa keberhasilan. UANC yang dipimpin oleh Muzorewa kemudian bergabung dengan ZUM bulan Januari 1994. Pada bulan Januari juga Mugabe bersaing dengan Sithole yang kembali dari pengasingan dan menciptakan partai sendiri yang bernama Zanu-Ndonga atau disebut juga dengan Zanu-Sithole. Dua partai tersebut dibentuk untuk menyaingi partai Zanu-PF pimpinan Mugabe di tahun 1990-an. Kemudian muncul partai *The United Front Democratic* (UDF) diluncurkan oleh Lupi Mushayakarara, mantan pemimpin Rhodesia Ian Smith, Abel Muzorewa, dan Ndabaningi Sithole. Bulan September 1999 Partai MDC didirikan dari Kongres Serikat Dagang Zimbabwe (ZCTU) yang terdiri dari 33 pekerja di bawah pimpinan Morgan Tsvangirai. Partai ini dibagi terbagi menjadi dua yaitu partai MDC Tsvangirai dan MDC

---

<sup>32</sup> *Ibid.*



Mutambara. Kedua partai didirikan bertujuan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Di sisi kubu Zanu-PF dihadapkan oleh keputusan Simba Makoni, mantan seorang anggota politbiro Zanu-PF dan Menteri Keuangan yang menyatakan melawan Presiden Mugabe. Makoni memutuskan untuk mendukung Arthur Mutambara dari partai MDC-Mutambara, yang akhirnya berdiri sebagai calon independen dalam pemilihan presiden.<sup>33</sup>

Zimbabwe tidak memiliki hukum yang mengharuskan pendaftaran partai-partai politik. Partai hanya didefinisikan dalam Undang-Undang Pemilu tahun 2004 pasal 4 ayat 1 sebagai organisasi politik. Sedangkan Undang-Undang Komisi Pemilihan Zimbabwe tahun 2004 pasal 2 mendefinisikan partai sebagai asosiasi masyarakat untuk menempatkan satu orang atau lebih wakilnya dalam pemerintahan daerah atau parlemen melalui pemilihan umum. Selain itu juga untuk menempatkan wakilnya dalam kepresidenan serta untuk mengkampanyekan hasil dari sebuah referendum. Mengenai sistem pembiayaan partai, tidak ada ketentuan tersendiri di Zimbabwe hingga undang-undang mengenai pembiayaan partai politik di adopsi pada tahun 1992. Undang-undang ini mengatur tentang pendanaan negara dari partai politik yang diselenggarakan oleh 15 kursi di parlemen atau lebih. Pada saat itu, hanya partai Zanu-PF yang memenuhi syarat dengan perolehan 117 dari 120 kursi di *House of Assembly*. Pihak Inggris kemudian menentang ketentuan tersebut ke Mahkamah Agung pada tahun 1997. Hasil dari pengadilan memutuskan bahwa ambang batas akan dikurangi menjadi sebesar 5 % dalam pemilu terakhir. Keputusan tersebut membawa dampak pada perubahan undang-undang keuangan partai politik di tahun 1997. Dalam undang-undang tahun 1997 juga disebutkan bahwa tidak ada ketentuan mengenai calon presiden independen serta melarang pendanaan dan sumbangan yang berasal dari pihak asing. Demikian pula dengan warga asing

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

dilarang meminta sumbangan dana dari masyarakat Zimbabwe atas nama partai politik.<sup>34</sup>

Pihak yang akan melakukan pendanaan harus membuat permohonan kepada menteri administrasi undang-undang pada akhir tahun keuangan dan menteri dapat menolak permohonan tersebut apabila partai tidak memenuhi syarat untuk pendanaan. Banding terhadap putusan menteri dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi, dan banding ke Mahkamah Agung dapat dibuat terhadap keputusan Pengadilan Tinggi. Menteri memiliki tugas untuk membuat peraturan administrasi undang-undang, termasuk mengenai peraturan yang mengatur tentang catatan donasi partai politik, pembukuan, bentuk audit, isi dan publikasi rekening oleh partai politik. Seperti halnya di banyak negara benua Afrika, tidak ada definisi tertentu dari anggaran belanja kampanye di Zimbabwe<sup>35</sup>.

## 2.5 Sistem pemilu di Zimbabwe

Dasar hukum konstitusi Zimbabwe tahun 1980 mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan tersebut terjadi pada tahun 1981, 1983, 1985, 1987, 1989, 1990, 1992, 1995, 1996, 2000, 2005 dan 2007. Selain itu juga terdapat undang-undang mengenai Pemilihan Umum (Bab 2:13) dan Komisi Pemilihan Zimbabwe Act (Bab 2:12), Referendum Act (Bab 2:10), Partai Politik (Pendanaan) Act (Bab 2:11). Dalam sistem pemilu Zimbabwe DPR memiliki 210 anggota tunggal konstituen pluralitas<sup>36</sup>, sedangkan Senat memiliki 60 kursi anggota tunggal dan anggota tunggal pluralitas (6 di setiap provinsi), 16 diantaranya dipilih oleh 2 orang kepala masing-masing dari 8 provinsi non-metropolitan<sup>37</sup>. Pemilu Presiden, DPR, dan Senat diselenggarakan setiap lima tahun sekali<sup>38</sup>. Presiden dipilih secara universal oleh warga negara, suara mayoritas mutlak diperlukan dalam hal ini<sup>39</sup>.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Constitution 1980, 38.

<sup>37</sup> Constitution 1980, 34(1)(a),(c).

<sup>38</sup> Constitution 1980, Article 29.

<sup>39</sup> Constitution 1980, Article 28(2), Electoral Act, 110(3).



Lembaga pemilihan umum yang ada di Zimbabwe adalah *Zimbabwe Electoral Commission (ZEC)*<sup>40</sup>. Fungsi ZEC terbatas dari konstitusi, diantaranya ialah mempersiapkan dan melakukan pemilihan umum dan referendum, memastikan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan secara efisien, bebas, adil, transparan dan sesuai dengan hukum. Fungsi lainnya adalah mengarahkan dan mengontrol pendaftaran pemilih, mendata dan mengumpulkan para pemilih serta melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada para pemilih.<sup>41</sup>

Kemandirian lembaga-lembaga pemilihan diatur dalam tata cara tersendiri. Ketua ZEC ditunjuk oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Komisi Yudisial dan jasa komisioner lainnya, paling tidak tiga orang di antaranya perempuan, diangkat oleh Presiden dari daftar sembilan nominasi yang diajukan oleh *Committee on Standing Rules and Orders*<sup>42</sup>. Tugas ZEC terbatas pada pemilihan parlemen (210 House of Assembly, 60 Senat) dan pemilihan pemerintah daerah setiap lima tahun, sejauh dapat dipraktekkan, mengambil representasi publik ketika melakukan pemilihan tersebut.<sup>43</sup> *House of Assembly Constituencies* masing-masing harus memiliki jumlah yang sama dari pemilih, dengan memperhatikan ciri-ciri fisik, komunikasi, distribusi geografis pemilih terdaftar, kepentingan masyarakat dan batas-batas pemilu yang ada.<sup>44</sup>

Pendaftaran pemilih bersifat sukarela secara terus menerus dan pendaftaran ditutup 24 jam sebelum hari pencalonan<sup>45</sup>. Pendaftaran konstituen harus berada dibawah pengawasan ZEC<sup>46</sup>. Calon pendaftar harus menunjukkan kartu identitas nasional dan bukti tempat tinggal dan dikeluarkan dengan sertifikat pendaftaran.<sup>47</sup> Para calon pemilih konstituen melakukan registrasi selama jam kerja dan salinan harus diberikan kepada publik pada pembayaran biaya yang

---

<sup>40</sup> Constitution, 61, 61A.

<sup>41</sup> *Ibid*, 61(4); Zimbabwe Electoral Commission Act, 4

<sup>42</sup> Constitution 1980, 61(1).

<sup>43</sup> Constitution 1980, 61A(1),(3); Electoral Act, 37A.

<sup>44</sup> Constitution 1980, 61A(4),(6).

<sup>45</sup> Electoral Act, 17A; 26A.

<sup>46</sup> Constitution 1980, 61(4)(c),(d),(h); Electoral Act, 24.

<sup>47</sup> Electoral Act, 24-26

telah ditentukan.<sup>48</sup> ZEC harus memastikan bahwa tingkat pendidikan pemilih yang dilakukan oleh orang lain (termasuk partai politik) adalah cukup, tidak menyesatkan atau bias, mereka harus warga negara Zimbabwe atau LSM yang terdaftar. Mereka harus mematuhi program dan instruksi dari ZEC dan tidak ada biaya, semua materi, *trainer* rincian dan pendanaan harus dilaporkan kepada ZEC, semua dana asing harus disalurkan dan distribusikan oleh ZEC.<sup>49</sup>

Dalam pemilihan parlemen, seorang kandidat dicalonkan melalui nominasi yang ditandatangani oleh sepuluh pemilih pendaftar, rincian data dan disertai dengan foto. Jika didukung oleh partai, berkas harus ditandatangani oleh pejabat partai, banyak biaya yang dibutuhkan serta pendaftaran sebagai pemilih dalam konstituensi<sup>50</sup>. Sedangkan dalam pemilihan presiden, persyaratannya antara lain ditandatangani oleh sepuluh pemilih yang terdaftar dari masing-masing provinsi, disertai data diri dan sebuah foto. Jika didukung partai harus ditandatangani oleh pejabat partai dan diperlukan mengenai berapa banyak biaya yang akan ditentukan.<sup>51</sup> Dana publik untuk partai-partai politik dengan minimal 5% dari suara dalam pemilu terakhir secara proporsional dengan jumlah suara yang mereka terima. Pendanaan asing dan sumbangan dilarang oleh undang-undang mengenai anggaran keuangan Partai Politik.<sup>52</sup>

Mengenai kampanye dalam pemilihan umum, kegiatan partai politik dan para calon kandidat harus tunduk pada kode etik yang telah diatur oleh undang-undang, namun tidak ada sanksi yang melekat pada pelanggaran. Tidak ditetapkan jangka waktu untuk kampanye, tetapi kegiatan kampanye dilarang dalam radius 300 meter dari tempat pemungutan suara (TPS) pada saat pemungutan suara berlangsung.<sup>53</sup> Undang-undang pemilu mengatur bahwa setiap pihak memiliki hak untuk akses masuk ke media, dan lembaga penyiaran publik

---

<sup>48</sup> Constitution 1980, 61(4)(f), Zimbabwe Electoral Commission Act, 14(a)

<sup>49</sup> Zimbabwe Electoral Commission Act, 15(1),(2), 16.

<sup>50</sup> Electoral Act, 46(1), 47(1).

<sup>51</sup> Electoral Act, 104(1).

<sup>52</sup> Political Parties (Finance) Act, 6(1).

<sup>53</sup> Electoral Act, Fourth Schedule; however, many of its prohibitions are violations of law and are prosecutable and punishable (Eg section 152, cf schedule 4(6)(e)).

harus memberi akses gratis bagi partai politik dan kandidat independen seperti yang tertuan dalam peraturan yang dibuat ZEC dengan persetujuan menteri. Dalam peraturan juga ditentukan mengenai total waktu yang akan dialokasikan untuk masing-masing wilayah serta periode waktu ketika siaran berlangsung. Pengalokasian haruslah bersifat adil dan memberikan kesempatan bagi partai serta kandidat untuk menyampaikan tentang semua pandangan mereka. Apabila media menerima iklan politik, mereka harus membayar semua aktor. Mengenai media diatur dalam sebuah kode etik dan ZEC harus memantau dan memastikan media mematuhi kode etik tersebut.<sup>54</sup>

Setelah penutupan penghitungan suara berlangsung di tempat pemungutan suara (TPS) oleh ketua TPS dihadapan petugas pemungutan suara, saksi, pengamat dan kandidat serta perwakilan pemilihan mereka yang hadir, hasilnya diluar TPS.<sup>55</sup> Saat penghitungan selesai, ketua ZEC mengumumkan hasil pemilu dan mengirimkannya ke petugas pemilu dan mengumumkan salinan hasil luar TPS<sup>56</sup>. Dihadapan para saksi, pengamat, para calon kandidat dan agen pemilihan, petugas pemilihan umum memverifikasi kembali hasil perhitungan suara. Setelah penghitungan selesai hasilnya akan disalurkan ke kantor kepala pemilihan umum yang kemudian diterbitkan dalam bentuk lembaran<sup>57</sup>. Komite penghubung multipartai ditetapkan oleh ZEC di tingkat nasional, provinsi dan konstituen. Tujuannya adalah untuk mencoba menyelesaikan sengketa pemilu, petisi pemilu yang didengar oleh pengadilan pemilihan<sup>58</sup>. Tentang pemantau pemilu individu diakreditasi oleh ZEC dan dapat memantau pemilu dengan tunduk pada kode etik. Pemantau individu yang mewakili negara-negara asing, organisasi internasional, regional dan lokal dan badan-badan yang mirip dengan ZEC yang diundang oleh

---

<sup>54</sup> Electoral Act, 3(c)(4); Zimbabwe Electoral Commission Act, 16C(1), 16D, 16E, 16G.

<sup>55</sup> Electoral Act, 62-64

<sup>56</sup> Electoral Act, 64-65

<sup>57</sup> Electoral Act, 65-67

<sup>58</sup> Electoral Act, 160A-160D, 161-165

Menteri Pemerintah dapat mengamati pemilu dan diakreditasi oleh komite akreditasi ZEC berdasarkan dengan kode etik<sup>59</sup>.

## 2.6 Krisis Politik di Zimbabwe Tahun 2008

Pemilihan presiden, pemilihan walikota dan legislatif berlangsung pada 29 Maret 2008 disaat Zimbabwe mengalami kondisi ekonomi, politik dan sosial yang sangat sulit. Dalam pemilihan presiden, Robert Mugabe sebagai calon presiden yang keenam kalinya dari partai *African National Union-Patriotic Front* (ZANU-PF) menghadapi Morgan Tsvangirai dari partai *Movement for Change and Democracy* (MDC) dan Simba Makoni, mantan menteri keuangan ZANU-PF. Sementara pada pemilihan parlemen, MDC akan menghadapi Zanu-PF. Pemilihan berlangsung tanpa adanya wartawan asing dan tekanan pengamat dari Eropa dan Amerika Serikat, pemerintah telah sepakat bahwa kehadiran pengamat dari negara-negara Afrika dinilai sudah cukup<sup>60</sup>.

Setelah melalui proses penghitungan yang panjang, pada tanggal 2 April 2008 Komisi Pemilihan Zimbabwe mengumumkan bahwa MDC adalah pemenang pemilu dengan meraih 105 kursi, sementara ZANU-PF mendapatkan 95 kursi. Pada tataran Senat, kedua belah pihak memperoleh jumlah kursi yang sama. MDC menuduh pemerintah dalam penundaan hasil pemilihan umum untuk memanipulasi keuntungan Robert Mugabe. Dalam kondisi yang tidak kondusif tersebut, pasukan keamanan dikerahkan di ibukota. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Condoleezza Rice menggambarkan bahwa rezim Robert Mugabe sebagai “*tindakan memalukan bagi rakyat Zimbabwe, Afrika bagian Selatan dan benua Afrika secara keseluruhan*”. Sementara itu Zanu-PF mengklaim memperoleh penghitungan ulang parsial dan hasil pemilihan presiden tidak diungkapkan. Minimnya publikasi resmi dari hasil pemilu membuat MDC menjadi takut jika Komisi Pemilihan Umum yang anggotanya ditunjuk oleh Robert Mugabe tidak

---

<sup>59</sup> Electoral Act, 6. The accreditation committee consists of the chairperson and vice-chairperson of the ZEC, a Commissioner designated by the Commission, a nominee of the Office of the President and Cabinet a nominee of the Minister and a nominee of the Minister of foreign affairs (Electoral Act Chapter 2:13, 6(2)).

<sup>60</sup>article de Reuters du [29 mars 2008](#)



manipulasi hasil. Sementara MDC menyatakan bahwa Morgan Tsvangirai terpilih sebagai presiden dengan 50,3% suara. Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-Moon mendesak pihak berwenang untuk melanjutkan penghitungan dengan hasil resmi pemilihan presiden. Untuk itu Robert Mugabe memanggil masyarakat Zimbabwe untuk melindungi wilayah mereka<sup>61</sup>.

Meskipun ZANU-PF telah dinyatakan kalah dari MDC dalam pemilihan parlemen tanggal 29 Maret 2008, hasil dari pemilihan presiden belum dipublikasikan selama tiga minggu setelah pemilu tersebut. Robert Mugabe kembali muncul ke publik pada perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Zimbabwe. Robert Mugabe selama ini melakukan kekerasan dan intimidasi untuk memastikan kemenangan dalam pemilihan presiden putaran kedua. Dalam kegiatan perayaan hari kemerdekaan Zimbabwe, Robert Mugabe mendapat kesempatan untuk menyerang Inggris di depan 15.000 aktivis dan pendukungnya yang berkumpul di sebuah stadion di pinggiran Harare. Dalam pidatonya, ia menyatakan bahwa bekas negara kolonialis tersebut “memanipulasi penduduk untuk berbalik melawan dia dan menyatakan bahwa Zimbabwe tidak akan pernah menjadi koloni kembali”. Selama demonstrasi yang berlangsung pada tanggal 20 Juni Mugabe juga menyatakan bahwa “hanya Tuhan-lah yang mampu menyingkirkan kekuasaannya”. Meskipun mayoritas Zimbabwe dimungkinkan untuk melakukan aksi balasan, tetapi mereka takut terhadap pembalasan yang lebih tragis. Morgan Tsvangirai memutuskan untuk memboikot pemilihan presiden lima hari sebelum pemilu putaran kedua dilaksanakan, hal tersebutlah yang memungkinkan Robert Mugabe untuk tampil sebagai pemenang<sup>62</sup>.

Sampai dengan pemilu putaran kedua, Robert Mugabe hampir mendapatkan dukungan penuh dari pendukung dan rekan-rekannya di Afrika. Setelah kekejaman yang dilakukan oleh para pendukungnya, Robert Mugabe yang dinyatakan sebagai pembunuh oleh Menteri Luar Negeri Perancis Bernard

---

<sup>61</sup> [Les voisins du Zimbabwe accusés de protéger Mugabe \[archive\]](#), article de l'AFP publié dans [20 minutes](#) du [31 mars 2008](#)

<sup>62</sup> [Robert Mugabe, l'instinct de conservation \[archive\]](#), article de Libération du [8 avril 2008](#)

Kouchner dibebaskan oleh beberapa negara tetangga Zibabwe seperti Zambia, Swaziland, Angola dan Botswana. Pada saat yang sama, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon mendukung pernyataan Tsvangirai yang menyerukan penundaan pemilu presiden putaran kedua. Penundaan tersebut dilakukan karena adanya kekerasan dan intimidasi yang semakin meningkat di Zimbabwe dan jika dilaksanakan pemilu ini akan mengurangi legitimasi. Ban Ki Moon mengatakan bahwa "situasi di Zimbabwe saat ini merupakan tantangan paling serius terhadap stabilitas di wilayah Afrika bagian Selatan". Pada tanggal 23 Juni dalam resolusinya, Dewan Keamanan PBB mengutuk krisis politik di Zimbabwe, khususnya menuduh pemerintah yang telah mengintimidasi lawan-lawan politiknya yang menggunakan hak untuk berkampanye secara bebas dan kekerasan. Selain itu Paddy Ashdown mantan Perwakilan Tinggi PBB dan Uni Eropa di Bosnia dan Herzegovina, menyatakan kekhawatiran bahwa kekerasan di Zimbabwe akan menyebabkan adanya *genosida*. Jacob Zuma, pemimpin *African National Congress* (ANC), mengkritik tindakan Robert Mugabe, dan menyarankan adanya intervensi darurat dari PBB dalam krisis politik di Zimbabwe<sup>63</sup>.

Pada tanggal 25 Juni 2008, Robert Mugabe diturunkan dari jabatannya oleh Inggris dan dikutuk oleh Konferensi Uskup Afrika Selatan dengan menyatakan bahwa "terjadi kegagalan yang tragis dalam kepemimpinan di Zimbabwe". Tetapi kemudian dibantah oleh SADC yang meminta untuk menunda pemilu presiden putaran kedua. Banyak pengacara internasional meyakini bahwa pemilu putaran kedua akan mengulur waktu dan tidak memiliki nilai dalam undang-undang. Selain itu Morgan Tsvaringai yang telah memperoleh suara mayoritas pada putaran pertama dengan perolehan 42 telah dinyatakan menjadi presiden Zimbabwe secara sah<sup>64</sup>. Pengumuman hasil resmi pemilu presiden putaran kedua menyebutkan bahwa Robert Mugabe terpilih untuk

---

<sup>63</sup>*Ibid.*

<sup>64</sup> [Selon Kouchner, Mugabe est un «assassin et un escroc» \[archive\]](#), article de Libération du 23 juin 2008



keenam kalinya. Dia secara resmi mendapatkan 2.150.269 suara dan Tsvangirai memperoleh 233.000 suara.

**Tabel 2.3: Hasil pemilu putaran pertama**

Calon Presiden	Jumlah Suara Para Calon	Dengan Persentase
Morgan Tsvangirai	1.195.562	47,9%
Robert Mugabe	1.079.730	43,2%
Simba Makoni	207.470	8,3%
Langton Towungana	14.503	0,6%

*Sumber: [Le silence sud-africain profite à Mugabe \[archive\]](#), article de Liberation du 24 juin 2008*

**Tabel 2.4: Hasil pemilu putaran kedua**

Calon Presiden	Jumlah Suara	Persentase	Catatan
Morgan Tsvangirai	233.000	9,8%	Telah menarik diri dari pemilu
Robert Mugabe	2.150.269	90,2%	

*Sumber: [Le silence sud-africain profite à Mugabe \[archive\]](#), article de Liberation du 24 juin 2008*

Setelah hasil resmi pemilu presiden ditetapkan, Robert Mugabe dilantik menjadi kepala negara Zimbabwe. Dengan demikian dirinya dapat menunjuk 33 senator tambahan, seperti yang tertulis dalam konstitusi, dan mengontrol parlemen<sup>65</sup>.

Di lain pihak, Sekjen PBB Ban Ki Moon berpendapat bahwa pemilu presiden tersebut tidak mencerminkan kehendak rakyat Zimbabwe sendiri. Amerika Serikat dan Eropa menganggap kemenangan Robert Mugabe sebagai sebuah tindakan perampasan dan membentuk suatu rezim pemerintahan yang tidak sah. Para kepala negara Afrika dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Uni Afrika di Sharm el-Sheikh menyebutkan bahwa pemilu di Zimbabwe tidak sesuai dengan standar Uni Afrika yang bersifat demokratis. Pemilu

<sup>65</sup>[Le silence sud-africain profite à Mugabe \[archive\]](#), article de Libération du 24 juin 2008

Zimbabwe sarat dengan kekerasan dan tidak ada akses yang terbuka terhadap media publik. Para kepala negara Afrika juga menyerukan pembagian kekuasaan antara Robert Mugabe dengan Morgan Tsvangirai dalam pemerintahan nasional. Diantara kepala negara Afrika, kepala negara Senegal dan Nigeria termasuk yang dikenal paling membenci Robert Mugabe. Botswana mengusulkan untuk mengeluarkan Zimbabwe dari keanggotaannya dalam organisasi SADC. Krisis politik di Zimbabwe telah membawa dampak yang cukup signifikan, terutama dalam bidang ekonomi, sosial dan politik<sup>66</sup>.

### 2.6.1 Dampak Krisis di Bidang Politik

Pasca terpilihnya Robert Mugabe sebagai presiden Zimbabwe pada pemilu 2008, kecaman terus bermunculan dari berbagai kalangan. Pemilu tersebut dianggap tidak demokratis, jujur, bebas dan adil. Terbukti dari banyaknya pelanggaran HAM serta kerusuhan yang terjadi selama masa kampanye hingga pemilu berlangsung. Banyak pihak beranggapan bahwa Robert Mugabe berada di balik kejadian tersebut. Berbagai identifikasi yang menyebutkan bahwa pemilu 2008 lalu memang di-*setting* sedemikian rupa untuk kemenangan partai ZANU-PF. Hal ini mulai terlihat dari pelaksanaan kampanye yang tidak adil. Pemerintah Mugabe pada waktu itu sengaja melarang organisasi internasional seperti *Cooperative for Assistance and Relief Everywher* (CARE International), *Save The Children*, dan *Mercy Corps* untuk memberikan bantuan makanan kepada rakyat Zimbabwe hingga pemilu berakhir. Di sisi lain pemerintahan pada waktu itu juga mengimpor 16.000 ton makanan untuk dibagikan kepada rakyatnya. Bantuan makanan tidak akan diberikan kepada wilayah yang menentang media dibawah kontrol pemerintah, seperti radio dan televisi. Selama kampanye dan pemilu media yang dikuasai pemerintah sangat condong pada pemberitaan Partai ZANU-PF.

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

Penelitian dari lembaga HAM dan peneliti independen menyebutkan bahwa terdapat ratusan ribu nama dalam daftar pemilih adalah nama duplikat atau pemilih sudah meninggal. Juga ditemukan fakta mengenai banyaknya tekanan dan kekerasan yang diterima partai oposisi MDC yang dipimpin oleh Morgan R. Tsvangirai dan pendukungnya selama pemilu berlangsung yang dilakukan aparat negara. Hal ini menyebabkan Tsvangirai mengundurkan diri pada pemilu putaran kedua, sehingga Mugabe kembali memenangkan pemilu. Persitiwa tersebut pada akhirnya mempengaruhi kebijakan luar negeri Robert Mugabe hingga saat ini. Secara umum pasca pemilu 2008, hubungan Zimbabwe di bawah pemerintahan Robert Mugabe dengan negara lain tidak berjalan dengan baik. Kecaman seperti tindakan Amerika Serikat yang terus mendesak PBB agar memberikan sanksi kepada Zimbabwe (Mugabe) akibat dari pemilu yang berjalan tidak secara demokratis. Tuntutan SADC pada KTT di Johannesburg, Agustus 2008 meminta agar Mugabe menyerahkan kekuasaannya kepada pihak oposisi, minimal sebagian dari kekuasaannya. Pendapat serupa juga diperkuat oleh keputusan Presiden Botswana Ian Khama yang tidak ikut dalam pertemuan KTT 2008 yang dikarenakan dirinya tidak bersedia mengakui Mugabe sebagai presiden terpilih<sup>67</sup>.

Peranan SDC sangat membantu dalam proses penyelesaian konflik dan krisis politik di Zimbabwe. Seperti yang dilakukan pada bulan Agustus 2010, SADC kembali mengadakan KTT yang diadakan setiap tahun di ibukota Namibia selama dua hari untuk membahas mengenai integrasi kawasan dan kemajuan politik dan ekonomi di Zimbabwe. Pada pertemuan tersebut Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan mengatakan bahwa secara ekonomi, kemajuan sudah mulai terlibat di Zimbabwe dengan kecenderungan pembangunan yang positif dan mulai bangkit dari program rehabilitasi ekonomi. Namun secara umum perkembangan Zimbabwe masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara lain. Hal ini terkait berdasarkan laporan tahunan PBB (4 November 2010)<sup>68</sup>, yang menyatakan

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Aninom tanpa tahun. <http://www.voanews.com/indonesian/news/PBB-Zimbabwe-Terburuk-Norwegia-Terbaik-untuk-Tinggal-106724593.html>, [diakses tanggal 12 Desember 2013]

Zimbabwe dan beberapa negara sub-Sahara Afrika sebagai negara terburuk, dengan Zimbabwe berada pada peringkat terakhir. Dalam menanggapi kecaman dunia internasional terutama negara Barat, dalam pidatonya (Juli 2010) Presiden Robert Mugabe tetap optimis bahwa Zimbabwe akan pulih dengan kecerdasan dan sumberdayanya sendiri. Mugabe menambahkan negaranya tidak membutuhkan bantuan negara Barat untuk membangun perekonomian negaranya<sup>69</sup>.

### 2.6.2 Dampak krisis di bidang ekonomi

Krisis ekonomi Zimbabwe menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi negara ini. Tidak hanya menjadi perhatian bagi masyarakat kawasan Afrika, tetapi juga menarik perhatian negara-negara di dunia. Inflasi merupakan permasalahan yang paling utama dari segi ekonomi Zimbabwe. Di era awal kemerdekaan tahun 1980, nilai Z\$ 1 setara dengan 1 Poundsterling. Beberapa tahun kemudian, tingkat inflasi di Zimbabwe justru meningkat drastis. Pada tahun 2006 saja, inflasi mencapai 1.200%, 2007 mencapai 66.212%, dan yang lebih parah terjadi pada tahun 2008 mencapai angka 2.200.000% . Inflasi tahun 2008 merupakan inflasi yang terbesar di dunia hingga saat ini. Kurs mata uang pun menurun drastis, nilai 1\$ mencapai Z\$<sup>70</sup>

Dampak dari inflasi yang tinggi tersebut, Bank Sentral Zimbabwe telah mengeluarkan empat versi mata uang. Terakhir bank sentral Zimbabwe mengeluarkan pecahan uang dengan nilai \$ 100.000.000.000.000 (100 triliun dolar) yang menjadi uang dengan nominal terbesar di dunia yang. Mata uang tersebut kemudian digantikan dengan versi dolar dimana setiap \$ 100.000.000.000.000 (100 triliun dolar) uang lama digantikan menjadi \$1 uang baru. Melihat kondisi ekonomi yang terus memburuk, bank sentral Zimbabwe

---

<sup>69</sup> Anonim tanpa tahun. <http://www.voanews.com/indonesian/news/africa/Mugabe-Zimbabwe-Tak-Butuh-Bantuan-Barat-98109454.html> [diakses tanggal 12 Desember 2013]

<sup>70</sup> Anonim tanpa tahun. [http://firlip.multiply.com/journal/item/28/Zimbabwe\\_Negeri\\_Sang\\_Diktator\\_Mugabe](http://firlip.multiply.com/journal/item/28/Zimbabwe_Negeri_Sang_Diktator_Mugabe) [diakses tanggal 12 Desember 2013]



memutuskan untuk membolehkan rakyatnya menggunakan mata uang dolar Amerika sebagai mata uang mereka untuk menstabilkan kembali perekonomian Zimbabwe. Tingginya tingkat inflasi (*hyperinflation*), membuat perekonomian negara tersebut mengalami kelumpuhan dan nilai mata uang dolar Zimbabwe terus mengalami kemerosotan. Uang tunai seolah-olah tidak ada nilainya lagi dalam masyarakat. Masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kupon untuk bahan bakar sebagai alat tukar dengan barang-barang kebutuhan rumah tangga dan kebutuahn lain. Bahkan para pedagang lebih memilih untuk menerima pembayaran dengan menggunakan kupon daripada mata uang lokal karena terjadinya devaluasi mata uang yang cepat terhadap dolar Zimbabwe<sup>71</sup>.

Jatuhnya perekonomian Zimbabwe, dipicu oleh pola manajemen yang tidak efisien serta perilaku rezim pemerintahan yang korup. Zimbabwe selama 1998-2002 juga terlibat perang dengan Republik Kongo, hingga menguras biaya ratusan juta dolar Amerika. Situasi semakin parah setelah Robert Mugabe menerapkan program reformasi lahan (*land reform*) yang tidak tepat sasaran. Pada tahun 2000, Mugabe mengambil alih secara paksa lahan pertanian milik petani kulit putih untuk didistribusikan ke petani kulit hitam. Kebijakan ini menyebabkan 4.000 petani kulit putih kehilangan lahan. Di lain sisi warga kulit hitam tidak memiliki persediaan benih, pupuk, dan bahan bakar yang cukup. Zimbabwe terpaksa mengimpor biji pangan dari Afrika Selatan, Zambia, dan Malawi. Sejak saat itu, kondisi ekonomi Zimbabwe mengalami penurunan. Ekspor pertanian, khususnya tembakau, turun drastis<sup>72</sup>.

Pengelolaan ekonomi yang buruk oleh Presiden Mugabe serta gejolak politik dan sosial di negara ini telah memperburuk keadaan Zimbabwe. Hal yang dilakukan oleh pemerintahan Mugabe untuk mempertahankan kekuasaannya adalah dengan mencetak uang secara besar-besaran. Uang dipakai untuk membayar gaji pegawai, tentara, dan belanja pemerintah. Peredaran uang menjadi

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Anonim tanpa tahun. <http://www.universityofkmt.com/forum/showthread.php?p=276#post276> [diakses tanggal 12 Desember 2013]

tak terkendali dan dinilai sebagai akar dari adanya hiperinflasi. Menghadapi masalah ini, Mugabe justru memerintahkan bank sentral Zimbabwe untuk terus mencetak uang. Gubernur Bank Sentral Zimbabwe, Dr. Gideon Gono, dengan sendirinya mematuhi perintah presiden Mugabe. Dengan peredaran uang yang meningkat berkali lipat, inflasi terus menanjak<sup>73</sup>

Kebijakan yang diambil pemerintah untuk menanggulangi krisis ekonomi belum menghasilkan perubahan yang berarti. Bank Sentral Zimbabwe memutuskan untuk meredenominasi mata uang dengan mengubah uang 10 miliar dolar Zimbabwe menjadi 1 dolar Zimbabwe atau menghilangkan 10 angka nol. Kebijakan tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat keluar dari hiperinflasi yang terjadi. Namun kebijakan ini masih belum mampu menyelesaikan permasalahan inflasi yang ada di Zimbabwe. Masalah lain yang harus dihadapi Zimbabwe yaitu berkaitan dengan kelangkaan arus dana masuk atau investasi dari luar. Walaupun demikian, pemerintah Mugabe terus berkilah bahwa krisis ekonomi ini terjadi akibat tekanan dari luar. Mugabe menuduh isolasi finansial secara masif yang dilakukan Amerika, Inggris, dan Uni Eropa melalui *Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act* (ZDERA) menjadi sumber utama tingginya tingkat inflasi di Zimbabwe. Menurut Mugabe, melalui ZDERA Amerika Serikat melakukan berbagai upaya ke Dana Moneter Internasional (IMF) dan lembaga keuangan lain untuk membatalkan kucuran dana bantuan untuk Zimbabwe. Sanksi tersebut diberikan karena Zimbabwe terlibat perang dengan Kongo. Dirinya bahkan menuding Inggris berada di balik inflasi yang mengguncang negeri itu<sup>74</sup>.

Kondisi perekonomian Zimbabwe terus mengalami pertumbuhan pada tahun 2007-2011 ditengah ketidakpastian politik. Perekonomian Zimbabwe meningkat lebih dari 9% per tahun pada 2010-2011, sebelum menurun menjadi 5% pada tahun 2012. Penurunan diakibatkan karena hasil panen yang menurun

---

<sup>73</sup> Anonim tanpa tahun. <http://us.detikfinance.com/read/2010/08/03/201531/1413059/5/kisah-zimbabwe-redenominasi-10-miliar-dolar-jadi-1-dolar> [diakses tanggal 12 Desember 2013]

<sup>74</sup> *Ibid.*



dan pendapatan dari tambang berlian yang rendah. *Dolarisasi* pada awal 2009 yang memungkinkan mata uang seperti Botswana, rand Afrika Selatan, dan dolar AS yang akan digunakan di tingkat lokal berakhir dengan hiperinflasi dan stabilitas harga berusaha dipulihkan namun terkena kelemahan struktural yang terus menghambat pertumbuhan berbasis luas.<sup>75</sup>

Perekonomian suatu negara dapat dilihat dari segi ekspor-impor, GDP, dan produk lokal yang dihasilkan. GDP Zimbabwe berada pada kisaran 500 US\$ per kapita/ tahun senilai dari tahun 2010 hingga 2012. Produk Zimbabwe terbagi dalam produk industri dan produk pertanian. Produk industri, diantaranya hasil pertambangan (batubara, emas, platinum, tembaga, nikel, timah, intan, tanah liat, biji logam dan bukan logam), baja, produk kayu, semen, kimia, pupuk, pakaian dan alas kaki, bahan makanan serta minuman. Produk pertanian meliputi jagung, kapas, tembakau, gandum, kopi, tebu, kacang. Dan dibidang peternakan meliputi domba, kambing, dan babi. Berikut adalah daftar produk ekspor-impor Zimbabwe ke negara lain.<sup>76</sup>

**Tabel 2.5 Persentase Produk Ekspor-Impor Zimbabwe**

Produk Ekspor	Diekspor ke Negara	(%)	Produk Impor	Diimpor ke Negara	(%)
Platinum dan emas (produk industri). tekstil, kapas, dan tembakau (produk pertanian)	Afrika Selatan	17,3	mesin dan peralatan transportasi, manufaktur, bahan kimia, bahan bakar, produk makanan	Afrika Selatan	55,4
	RRC	16,9		RRC	9,2
	Kongo	11,7			
	Bostwana	10,5			
	Italia	6,1			
Total Ekspor		62,5	Total Impor		64,4

Sumber : diolah dari dokumen *CIA-The World Factbook*

<sup>75</sup> CIA-The World Factbook. 2013. <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/zi.html>. [Diakses pada 06 januari 2014]

<sup>76</sup> CIA-The World Factbook. 2013. <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/zi.html>. Diakses pada 10 februari 2014, pukul 15:28 wita.

Berdasarkan tabel diatas, ekspor Zimbabwe diantaranya berupa hasil tambang seperti platinum dan emas. Bahan ekstil yang termasuk bahan industri antara lain kapas dan produk pertanian seperti tembakau. Adapun produk ekspor Zimbabwe dikirim ke lain seperti Afrika Selatan 17,3%, RRC 16,9%, Republik Demokratik Kongo 11,7%, 10,5% Botswana, Italia 6,1% hingga tahun 2011. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Zimbabwe mengimpor mesin produksi dan peralatan transportasi, manufaktur, bahan kimia, bahan bakar, produk makanan yang berasal dari Afrika Selatan 55,4%, China 9,2% hingga tahun 2011.

Perekonomian Zimbabwe mengalami hiperinflasi berdasarkan Bank Sentral Zimbabwe yang menyatakan tingkat inflasi mencapai pada tingkat 150.000 persen pada tahun 2008. Dalam pengumuman pertama mengenai inflasi empat bulanannya, Gubernur *Reserve Bank* Gideon Gono mengatakan inflasi yang merupakan hasil dari “*ketidakseimbangan makro ekonomi yang paling menghancurkan di dalam negeri*” ini berdampak pada semua sektor masyarakat. Kantor Pusat Statistik Zimbabwe sebenarnya telah menyatakan inflasi hanya di bawah 8.000 persen pada tahun 2007.<sup>77</sup>

Tahun 2009 Zimbabwe bahkan mencetak mata uang dengan denominasi 100 triliun dolar, yang sebenarnya hanya setara dengan US\$ 300 atau sekitar Rp 3,3 juta. Bank Sentral Zimbabwe juga memperkenalkan tiga mata uang dengan denominasi 10, 20 dan 50 triliun dolar.<sup>78</sup> Seiring terjadinya hiperinflasi, nilai tukar mata uang Zimbabwe turun sangat tajam. Mata uang yang dikeluarkan sebelumnya dalam denominasi jutaan dan miliaran ternyata tidak cukup untuk mengatasi hiperinflasi. Pengeluaran mata uang dalam denominasi triliunan dolar tersebut terjadi hanya sepekan setelah Bank Sentral Zimbabwe mengeluarkan mata uang dalam denominasi miliaran yakni 10,20 dan 50 miliar dolar. Namun

---

<sup>77</sup>Istik.2008.<http://finance.detik.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/02/tgl/03/time/164057/idnews/888471/idkanal/4>. Diakses 17 januari 2014 pukul 15:30 wita.

<sup>78</sup>KB Finance. 2009. *Zimbabwe Luncurkan Uang dengan Nilai Triliun*.  
<http://www.kilasberita.com/ekonomi-moneter/zimbabwe-luncurkan-uang-dengan-nilai-triliun>.  
diakses pada 19 Januari 2014 pukul 16:30 wita.

mata uang berdenominasi miliar tersebut tidak dapat menahan hiperinflasi. Perekonomian Zimbabwe mengalami hiperinflasi dan mengakibatkan dampak sosial yang buruk<sup>79</sup>.

### 2.5.3 Dampak Krisis di Bidang Sosial

Krisis ekonomi Zimbabwe berdampak pula pada runtuhnya sektor jasa dan sosial terutama di bidang kesehatan dan pendidikan tahun 2008. Situasi yang memburuk ini menciptakan krisis sumber daya manusia, ditandai dengan menurunnya tingkat harapan hidup dari 63 tahun pada tahun 1990 menjadi 40,9 tahun pada tahun 2005 dan meningkatnya angka kematian anak sebesar 76-132 kematian per 1000 antara tahun 1990 dan 2005.<sup>80</sup> Pelayanan kesehatan mengalami kendala, diantaranya kurangnya stok obat-obatan di sebagian besar rumah sakit dan klinik kesehatan. Ancaman lain dalam bidang sosial dan kesehatan akibat adanya krisis di Zimbabwe ialah meningkatnya jumlah penderita infeksi HIV/AIDS. Pada tahun 2007, prevalensi HIV di Zimbabwe adalah 15,6 % adalah orang dewasa berusia antara 15-49 tahun dan 26 % ( tahun 2006 ) diantaranya wanita hamil. Sementara angka kematian rata-rata dari pandemi ini berjumlah 3200 orang per minggu pada tahun 2007. Kejadian tersebut membuat Zimbabwe berada di urutan tertinggi keempat negara penderita HIV/AIDS di dunia.<sup>81</sup> Pandemi tersebut memerlukan penanganan serius dan membutuhkan dana lebih besar di sektor kesehatan.

Epidemi kolera yang terjadi pada tahun 2008 dengan korban berjumlah ribuan jiwa merupakan sebagian bukti dari semakin terpuruknya sektor kesehatan Zimbabwe. Hal ini juga diperparah dengan bruruknya sistem tata kelola negara, struktur ekonomi, politik dan sosial hingga pemerintah Zimbabwe tidak dapat menyediakan air minum bersih bagi warganya. Dari gambaran diatas terlihat bahwa pemerintah Zimbabwe telah gagal menjalankan fungsi negara yang paling

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Reuters, "Factbox – Zimbabwe's meltdown".

<sup>81</sup> *Ibid.*

dasar dalam melindungi kesehatan masyarakatnya. Termasuk pula pemeliharaan rumah sakit umum dan klinik dan dukungan untuk tenaga kesehatan yang dibutuhkan untuk menjaga sistem kesehatan masyarakat<sup>82</sup>.

Wabah kolera telah menyebar ke semua propinsi di Zimbabwe, penderita Kolera banyak ditemukan di ibukota Harare. Penyakit ini menyebar melalui air minum yang sudah tercemar sebagai media utama. Oleh sebab itu, daerah di mana sebagian besar masyarakat terpaksa tinggal di tempat yang sempit karena terdesak akibat perang, menjadi tempat penyebaran kolera. Menurut perkiraan PBB, selama ini terdapat sekitar 570 orang di Zimbabwe meninggal akibat kolera dan sekitar 12.700 orang lainnya tertular. Namun demikian, jumlah sesungguhnya korban penyakit kolera kemungkinan besar jauh lebih tinggi lagi. Perdana Menteri Inggris Gordon Brown menyerukan masyarakat internasional untuk mengajukan tuntutan kepada Mugabe pada hari Sabtu (06/12), karena penderitaan rakyat Zimbabwe sudah semakin memprihatinkan. Menurut Brown krisis pangan dan kolera yang menyebabkan ratusan orang meninggal dunia tersebut, tidak hanya menjadi masalah intern negara itu saja, melainkan menjadi masalah internasional dan membutuhkan uluran tangan pihak internasional. Brown menambahkan, pemerintah Zimbabwe tidak mampu melindungi, menjaga dan menolong rakyatnya<sup>83</sup>.

Selain menanggung beban berat seperti yang dijelaskan diatas, warga Zimbabwe masih harus berjuang dalam menegakkan HAM. Warga Zimbabwe seringkali menjadi sasaran intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan pendukung partai yang berkuasa. Para pendukung partai berkuasa mengintimidasi dan melakukan kekerasan terhadap warga lain dengan karena menilai warga tersebut mendukung partai oposisi. Sementara itu, akibat dari situasi yang kian memburuk di Zimbabwe banyak para warga meninggalkan

---

<sup>82</sup> Physicians for Human Rights, *Health Ruins.in*

<sup>83</sup> Anonim tanpa tahun. <http://www.dw.de/krisis-kolera-di-zimbabwe/a-3854287-1> [diakses tanggal 12 Desember 2014]

negara mereka dan memilih bergabung dengan diaspora Zimbabwe yang ada di luar negeri.<sup>84</sup>



---

<sup>84</sup>Cited in Physicians for Human Rights, *Health in Ruins: A man-Made Disaster in Zimbabwe*, (Cambridge, Massachusetts: PHR, January 2009), 5, at <http://physiciansforhumanrights.org> For a discussion of the decline of post-colonial higher education in Zimbabwe, see A. S. Mlambo “Post- colonial higher education in Zimbabwe: The University of Zimbabwe as a case study 1980-2004”, *Kleio*, 37 (2005), 106-130.



### BAB III

#### Gambaran Umum *Southern African Development Community*

##### 3.1 Sejarah dan Tujuan SADC

*The Southern African Development Community* (SADC) atau masyarakat pembangunan Afrika selatan pada awalnya bernama *Southern African Development Co-ordination Conference* (SADCC). Organisasi pemerintah regional tersebut dibentuk pada 1 April 1980 di Lusaka, Zambia. SADCC dibentuk sebagai persekutuan atau aliansi dari sembilan negara di kawasan Afrika selatan. Kesembilan Negara pendiri SADCC antara lain Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Swaziland, Republik Tanzania, Zambia dan Zimbabwe.

SADCC memiliki tujuan utama yaitu mengkoordinasi proyek-proyek pembangunan guna mengurangi ketergantungan ekonomi negara-negara di Afrika Selatan terhadap ras kulit putih. Adapun tujuan yang lebih spesifik dari SADCC antara lain sebagai berikut,<sup>85</sup>

- a. Mengurangi ketergantungan anggota kepada negara lain di segala bidang khususnya bidang ekonomi, terutama dari pemerintah *apartheid*,
- b. Mengimplementasikan program yang berdampak nasional dan regional,
- c. Memobilisasikan sumber daya anggota untuk memperkuat kemandirian kolektif
- d. Menggalang pemahaman dan dukungan internasional.

Melalui pertemuan puncak para pemimpin negara-negara Afrika Selatan di Windhoek, Namibia pada 17 Agustus 1992, SADCC secara resmi berubah menjadi SADC. Dalam pertemuan tersebut, deklarasi dan Perjanjian ditandatangani sebagai landasan hukum organisasi SADC. Adapun Negara-negara yang anggota SADC dapat dilihat dalam tabel berikut,

---

<sup>85</sup> Anonim. Tanpa tahun. <http://www.sadc.int/about-sadc/overview/history-and-treaty/> [diakses tanggal 10 Januari 2014]



**Tabel 3.1 Negara-negara anggota SADC**

<b>No</b>	<b>NAMA NEGARA</b>	<b>MULAI MENJADI ANGGOTA SADC</b>
1	Angola	17 Agustus 1992
2	Botswana	17 Agustus 1992
3	Lesotho	17 Agustus 1992
4	Malawi	17 Agustus 1992
5	Mozambic	17 Agustus 1992
6	Swaziland	17 Agustus 1992
7	Tanzania	17 Agustus 1992
8	Zambia	17 Agustus 1992
9	Zimbabwe	17 Agustus 1992
10	Namibia	31 Maret 1990
11	South Africa	30 Agustus 1994
12	Mauritius	28 Agustus 1995
13	Democratic Republic of Congo	8 September 1997
14	Madagascar	18 Agustus 2005
15	Seychelles	15 Agustus 2007

Sumber: <http://www.sadc.int/about-sadc/overview/history-and-treaty/>

Tujuan utama dari SADC adalah untuk mencapai pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, meningkatkan standar dan kualitas hidup rakyat Afrika bagian Selatan dan mendukung yang kurang beruntung secara sosial melalui integrasi regional. Tujuan ini akan dicapai melalui peningkatan integrasi regional yang dibangun di atas prinsip-prinsip demokrasi dan pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Negara-negara Afrika bagian Selatan telah mengadopsi kerangka kerja sama berdasarkan:<sup>86</sup>

- kerjasama ekonomi yang lebih dalam dan integrasi, atas dasar neraca, ekuitas dan saling menguntungkan, menyediakan untuk meningkatkan investasi dan perdagangan, pergerakan bebas faktor-faktor produksi, dan barang dan jasa lintas batas negara;
- ekonomi, politik, nilai-nilai sosial, meningkatkan daya saing perusahaan, demokrasi dan tata pemerintahan yang baik, menghormati aturan hukum dan jaminan hak asasi manusia, partisipasi rakyat dan pengentasan kemiskinan, dan solidaritas regional, perdamaian dan keamanan, agar orang-orang bisa hidup dan bekerja bersama dalam damai dan harmoni.

### 3.2 Struktur SADC

Transformasi dari SADCC ke SADC tidak hanya memiliki catatan prestasi yang luar biasa tetapi juga memunculkan beberapa tantangan. Hal tersebut sebagai akibat dari kekurangan dalam struktur yang sudah ada. Salah satu tantangan tersebut yang utama adalah pembentukan sebuah kerangka kelembagaan yang tepat dan efektif dan struktur untuk melaksanakan mandat baru organisasi SADC. Adapun struktur organisasi SADC antara lain sebagai berikut,

#### 3.2.1 *Summit of heads of state and Government*

*The Summit heads of state and Government* merupakan sebuah lembaga pembuatan kebijakan utama dari SADC. Lembaga ini bertanggung jawab terhadap keseluruhan arah kebijakan dan pengendalian fungsi dari Komunitas. *The Summit heads of state and Government* melaksanakan rapat sekali setahun. Rapat tersebut biasanya dilaksanakan sekitar bulan Agustus atau September di suatu negara anggota. Dalam rapat tersebut para anggota memilih Ketua dan

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

Wakil yang baru. Namun berdasarkan struktur yang terbentuk di Angola pada bulan Oktober 2002, rapat tersebut diubah menjadi dua kali dalam setahun.<sup>87</sup>

### 3.2.2 *The Troika*

Struktur *The Troika* terdiri dari Ketua, Ketua *Incoming* dan *Outgoing* dari Ketua SADC. Lembaga ini didirikan pada bulan Agustus 1999 dalam pertemuan *The Summit heads of state and Government* di Maputo, Mozambik. Negara-negara anggota lain dapat diintegrasikan ke dalam *The Troika* bila diperlukan. Lembaga ini dibentuk untuk melaksanakan tugas dan keputusan secepatnya serta memberikan arahan kebijakan kepada lembaga SADC, misalnya pertemuan SADC biasa.<sup>88</sup>

### 3.2.3 *Concil of Ministers*

Dewan Menteri terdiri dari beberapa menteri yang berasal dari masing-masing negara anggota. Mereka biasanya merupakan perwakilan dari kementerian luar negeri dan perencanaan ekonomi atau keuangan dari masing-masing negara anggota SADC. Dewan ini bertanggung jawab untuk mengawasi fungsi dan pengembangan SADC serta memastikan bahwa kebijakan yang telah diratifikasi atau disepakati dapat diterapkan dengan benar. Dewan menteri biasanya bertemu dua kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Januari dan sebelum pertemuan puncak pada bulan Agustus atau September. Namun setelah pertemuan *The Summit heads of state and Government* pada bulan Oktober 2002, Pertemuan Dewan menteri tersebut akan diadakan empat kali dalam setahun.<sup>89</sup>

### 3.2.4 *Standing Committee of Officials*

*The Standing Committee of Officials* terdiri dari satu Sekretaris Utama atau jabatan yang setara dari setiap negara anggota, khususnya berasal dari

---

<sup>87</sup> Anonim tanpa tahun. <http://www.sadc.int/about-sadc/sadc-institutions/> [diakses tanggal 10 Januari 2014]

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> *Ibid.*

kementerian yang bertanggung jawab atas perencanaan ekonomi atau keuangan. Komite ini merupakan komite penasehat teknis kepada *Concil of Ministers*. Ketua dan wakil ketua komite tetap diangkat dari negara-negara anggota SADC. Selain itu, negara anggota juga berhak menetapkan *Chairpersonship* dan Wakil *Chairpersonship* dalam Dewan tersebut.<sup>90</sup>

### 3.2.5 SADC National Committees

Komite ini terdiri dari pemangku kepentingan terutama pemerintah, terutama sektor swasta dan masyarakat sipil di negara-negara anggota SADC. Fungsi utama mereka adalah untuk memberikan masukan pada tingkat nasional dalam perumusan kebijakan dan strategi regional, serta untuk mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan program ini di tingkat nasional. Komite ini juga bertanggung jawab untuk inisiasi proyek dan makalah masalah sebagai masukan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Indikatif.<sup>91</sup>

### 3.2.6 Secretariat

Sekretariat merupakan lembaga eksekutif utama dari SADC bertanggung jawab untuk perencanaan strategis, koordinasi dan pengelolaan program SADC. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Eksekutif dan memiliki kantor pusat di Gaborone, Botswana. Prioritas fungsi dari Sekretariat didasarkan pada bagaimana Sekretariat terbaik yang dapat memberikan kontribusi pada tujuan keseluruhan dari SADC. Adapun prioritas yang disepakati oleh negara-negara anggota antara lain sebagai berikut,

- a. Perdagangan, Keuangan dan Investasi
- b. Meningkatkan kapasitas untuk pengembangan sumber daya manusia
- c. Partisipasi Stakeholder
- d. Pengarusutamaan gender
- e. Promosi gambar SADC

---

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> *Ibid.*

- f. Kebijakan, perumusan dan harmonisasi
- g. Penguatan lembaga yang terlibat dalam membangun masyarakat<sup>92</sup>

### 3.2.7 *Organ on Defense, Politics and Security cooperation*

Organ ini bertanggung jawab untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan. Selain itu, organ ini bertugas untuk melaporkan hasil rapat mereka kepada *Summit SADC* yang dipimpin oleh seorang *Troika*, yang terdiri dari ketua *incoming* dan ketua *outgoing*. *The Summit SADC* dan *Organ Troika* merupakan dua lembaga eksklusif dalam SADC. Komite tingkat menteri yang bertanggung jawab untuk urusan luar negeri, pertahanan, keamanan publik dan keamanan negara dari masing-masing pihak melaporkan permasalahan dalam negeri salah satu negara anggota kepada ketua dan bertanggung jawab atas koordinasi pekerjaan organ dan struktur dari *Organ on Defense, Politics and Security cooperation*. Menteri luar negeri masing-masing negara anggota melakukan fungsi organ yang berkaitan dengan politik dan diplomasi dalam politik *inter-state* dan komite diplomasi. Menteri pertahanan, keamanan publik dan keamanan negara bekerja melalui pertahanan *Inter-state* dan komite keamanan.<sup>93</sup>

### 3.2.8 *Tribunal*

*Tribunal* merupakan sebuah protokol yang menjadi dasar pengadilan di SADC. Protokol ini ditandatangani di Windhoek, Namibia pada KTT SADC pada tahun 2000. Setelah didirikan, pengadilan akan memastikan kepatuhan, penafsiran yang tepat dari ketentuan perjanjian SADC dan instrumen perusahaan. Selain itu, protokol ini juga berfungsi untuk mengadili perselisihan antar-negara anggota SADC. Dalam perkembangannya, Protokol ini telah diamandemen melalui sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh Kepala Negara dan Pemerintah di Luanda pada bulan Oktober 2002.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> *Ibid.*



### 3.2.9 *Inter-state Defence and Security Committee (ISDSC)*

Pertahanan dan Keamanan Komite Antar-Negara (ISDSC) didirikan sebagai substruktur *America Frontline* oleh Mozambik, Tanzania dan Zambia pada tahun 1975. Pada saat pendiriannya, ISDSC pada dasarnya adalah sebuah komite kementerian di mana para menteri bertanggung jawab untuk pertahanan, polisi, keamanan Negara atau Intelijen dan pelayan keimigrasian. Namun dalam perkembangannya, mereka bertemu untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan persyaratan keamanan kolektif dan perjuangan pembebasan. ISDSC tidak memiliki piagam atau konstitusi dan juga tidak memiliki markas atau sekretariat. Keanggotaan ISDSC diperluas untuk mencakup semua negara anggota SADC oleh pengakuan Malawi, Afrika Selatan dan Swaziland. Mauritius disambut sebagai anggota kedua belas pada Konferensi Tahunan ISDSC yang digelar di Lilongwe selama bulan Oktober 1996. Pada bulan November 1997, DRC dan Seychelles diterima sebagai anggota, setelah aksesinya mereka untuk keanggotaan SADC.<sup>95</sup>

Pada tahun 1999 SA Departemen Luar Negeri meringkas fungsi utama tiga subkomite ISDSC sebagai berikut,

- a. Pertahanan, yaitu untuk meninjau dan berbagi pengalaman mengenai situasi keamanan militer yang berlaku di negara-negara anggota, untuk menjelajahi bidang lanjut kerjasama militer multilateral dan cara praktis untuk realisasinya, bertukar pandangan dan mengusulkan mekanisme untuk pencegahan, manajemen dan resolusi konflik.
- b. Keamanan Publik yaitu untuk mengkoordinasikan dalam sub regional tersebut, untuk bertukar pengalaman dan informasi antar negara anggota mengenai isu-isu keamanan publik seperti pencurian kendaraan bermotor, perdagangan narkoba, uang palsu, imigran ilegal, dokumen perjalanan palsu

---

<sup>95</sup> Roland Marchal, *le role des organisations regionales africaines dans la prevention de conflits (en afrique)* annee 2001, page 8

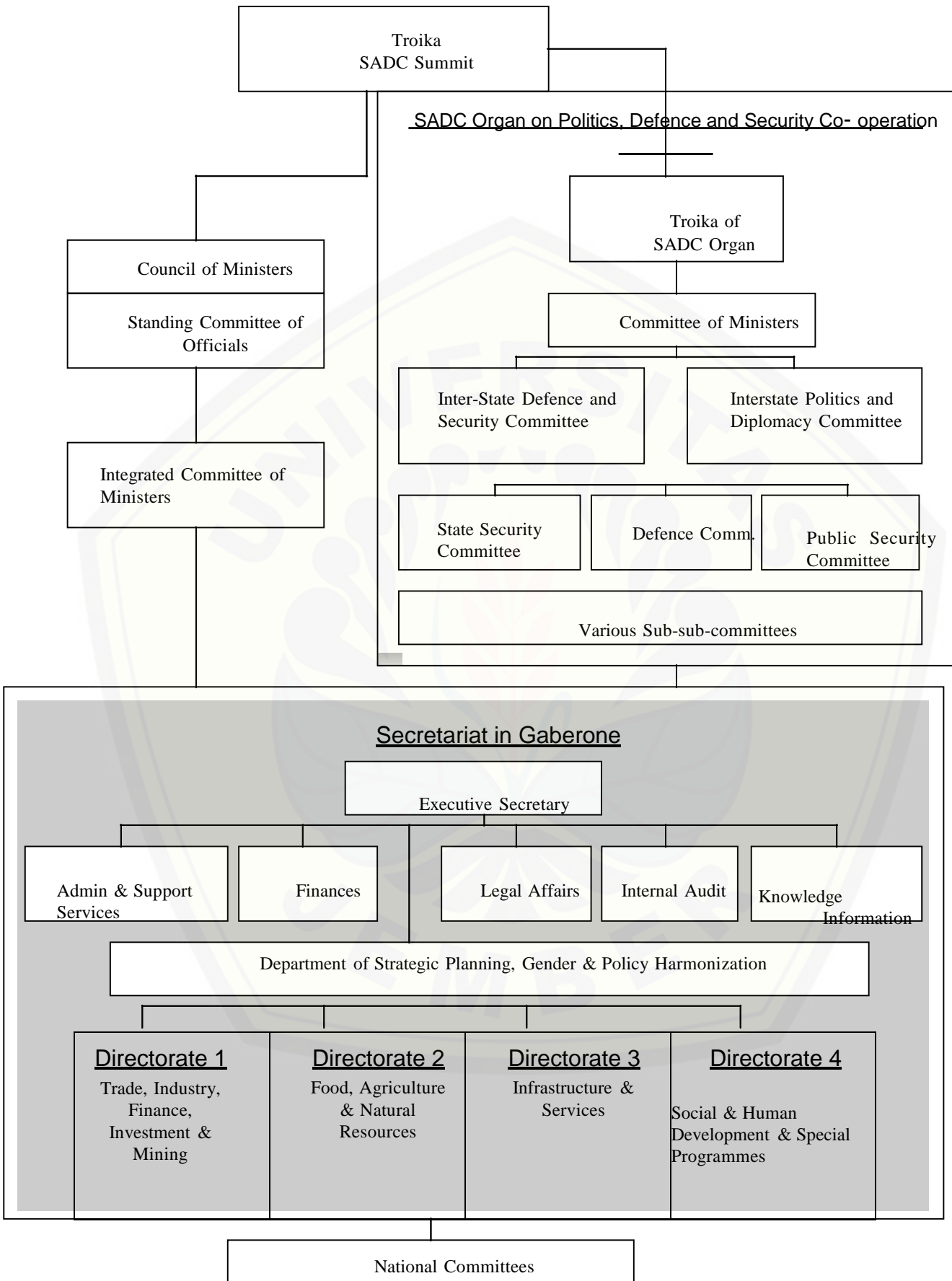
dan penyelundupan senjata api, dan untuk menjelajahi daerah dan sarana meningkatkan kerjasama antar lembaga kepolisian di sub regional tersebut.

- c. Keamanan Negara yaitu untuk meninjau situasi keamanan di sub regional dan menganalisis isu-isu yang mempengaruhi negara-negara anggota masing-masing, termasuk ketidakstabilan politik, konflik bersenjata, masuknya pengungsi, ekstremisme agama dan kejahatan terorganisir, untuk merekomendasikan langkah-langkah yang tepat untuk menangani potensi ancaman terhadap stabilitas dari sub regional tersebut, dan untuk mempertimbangkan cara-cara mengkonsolidasikan dan memperluas kerjasama antara negara-negara anggota mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keamanan negara.<sup>96</sup>

Struktur organisasi SADC selengkapny adalah seperti yang diperlihatkan pada gambar 3.2 di bawah ini

---

<sup>96</sup> *Ibid.*



Gambar 3.1: STRUKTUR ORGANISASI SADC

sumber: <http://www.sadc.int>

### 3.3 *Development of the SADC organ for politics, defense and security.*

SADC menyediakan sarana dan prasarana untuk kerjasama dalam politik, diplomasi, hubungan internasional, perdamaian dan keamanan. Resolusi dan rekomendasi dari lokakarya SADC pada demokrasi, perdamaian dan keamanan, yang diselenggarakan di Windhoek pada Juli 1994. Mereka berusaha untuk menempatkan SADC, khususnya terhadap keterlibatan resmi dalam keamanan koordinasi, mediasi konflik, dan bahkan kerjasama militer. Hal tersebut dilakukan oleh para Menteri Luar Negeri, Pertahanan dan Keamanan dalam pertemuan di Gaborone pada Januari 1996. Berikut ini pernyataan pers yang tercatat dalam rekomendasi untuk KTT SADC,

*"... pembentukan organ politik SADC , pertahanan dan keamanan yang akan menghasilkan lebih banyak fleksibilitas dan respon yang tepat waktu, pada tingkat tertinggi, situasi sensitif dan berpotensi meledak. Modalitas bagaimana SADC organ yang diusulkan dapat terstruktur dan dioperasionalkan akan ditentukan oleh Summit."*<sup>97</sup>

Struktur dan fungsi lembaga ini akhirnya diselesaikan dalam pertemuan tingkat menteri luar biasa pada bulan Mei 2000 di Swaziland. Namun Zimbabwe melecehkan pertemuan tersebut dan mengakibatkan proses pengambilan keputusan untuk mengadopsi Protokol menjadi ditunda sampai bulan Agustus 2000 dalam rapat SADC di Windhoek. Protokol tersebut akhirnya diadopsi oleh para Kepala Negara SADC di Blantyre, Malawi pada tahun 2001. Kemudian protokol tersebut diratifikasi oleh enam negara anggota pada tanggal 3 Oktober 2002. Mozambik terpilih kembali sebagai ketua lembaga *Development of the SADC organ for politics, defense and security* dan Lesotho dipilih sebagai Wakil Ketua melalui rapat *The Summit SADC* di Luanda pada bulan September 2002. Rencana Strategis Indikatif untuk Organ (SIPO) sedang disusun untuk mengidentifikasi politik, keamanan dan demokratis setra persyaratan pada *level* daerah.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> *Ibid.*

### **3.4 Decision Making Process SADC untuk melaksanakan mediasi di Zimbabwe**

Pada pertemuan SADC di Lusaka, Zambia pada bulan Agustus 2007, Presiden Afrika Selatan, Thabo Mbeki, melaporkan kepada para kepala negara anggota SADC tentang usahanya untuk menjembatani perselisihan antara partai ZANU-PF dan gerakan oposisi untuk perubahan demokratis yang saling bertikai. Laporan ini disampaikan kepada komite khusus yang terdiri dari Tanzania, Angola dan Namibia yang bertemu secara tertutup sebelumnya. Sekertaris KTT, Tomaz Salomao juga mempresentasikan sebuah laporan tentang krisis ekonomi yang semakin memburuk di Zimbabwe serta memberikan proposal rencana perbaikan kepada komite khusus tersebut. Sementara itu, keadaan di Zimbabwe semakin memburuk di mana pemerintah Zimbabwe tetap bersikeras bahwa negaranya tidak memerlukan reformasi politik dan menyalahkan Inggris atas krisis yang disebabkan masalah internal. Dr. Jackie Silas, kepala Institut Studi Keamanan di Pretoria, Afrika Selatan, berpendapat bahwa jika Presiden Mugabe tetap menolak bantuan mediasi dari negara-negara tetangga, maka SADC harus mengambil posisi yang lebih tegas lagi di wilayah ini.<sup>99</sup>

Perpecahan yang menyelimuti negara-negara Afrika di dalam menyikapi krisis Zimbabwe semakin tajam. Botswana dan Nigeria dalam pernyataan yang disampaikan pemerintah mereka menegaskan bahwa mereka tidak mengakui hasil pemilihan presiden Zimbabwe putaran ke-2. Sementara di sisi lain, Robert Mugabe menegaskan sikapnya untuk tetap berkuasa di Zimbabwe. Selain itu, perpecahan tajam juga menimpa negara-negara Afrika yang menghadiri KTT Uni Afrika di Mesir untuk membicarakan krisis Zimbabwe. Banyak negara Afrika yang hadir dalam pertemuan tersebut menolak menyampaikan tekanan publik terhadap Mugabe, meskipun ada desakan PBB dan negara-negara Barat yang mendorong untuk menerapkan tindakan tegas terhadap krisis itu. Di penghujung KTT, para pemimpin Afrika menyetujui sebuah resolusi yang menyerukan untuk mengagendakan sebuah

---

<sup>99</sup>Anonim. Tanpa tahun. <http://fisip.budiluhur.ac.id/2008/07/mugabe-ngotot-ingin-berkuasa/> [diakses 11 Januari 2014]



dialog dan mediasi di Zimbabwe. Meskipun dikecam komunitas internasional, pemilihan presiden putaran ke-2 tetap saja diselenggarakan meski.<sup>100</sup>

Mugabe mengatakan bahwa ia secara terbuka menerima saran untuk melakukan pertemuan diskusi dengan pihak oposisi. Mugabe, dalam kepulangannya menuju Harare, sebagaimana ditayangkan *SABC Television News* menegaskan bahwa,

“Merupakan kenyataan bahwa untuk semua orang, yang pertama dan paling penting dilakukan, adalah harus terlebih dahulu menerima kami, jika mereka ingin berdialog dengan kami. Sayalah Presiden Republik Zimbabwe dan tidak ada yang lain.”<sup>101</sup>

Di sisi lain, sepucuk surat telah dilayangkan oleh Presiden Botswana, Seretse Ian Khama kepada Komunitas Pembangunan Negara-negara di Selatan Afrika (SADC). Dalam surat tersebut, ia meminta agar SADC segera mencabut keikutsertaan Zimbabwe dari pertemuan-pertemuan blok regional SADC pada masa-masa mendatang. Paska pemilihan yang dilaksanakan 2008 di Zimbabwe, kekerasan dan konflik antara ZNU-PF dan MDC semakin memanas sehingga SADC memutuskan agar mediasi terhadap kedua pihak tersebut dilakukan.<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> Anonim. Tanpa tahun. <http://www.dw.de/masalah-zimbabwe-dalam-pertemuan-puncak-sadc/a-2932419> [diakses tanggal 11 Januari 2014]